



**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
KEPALA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT**

LKPJ
TAHUN 2019



DINAS SOSIAL PROVINSI SUMATERA BARAT

Jl. Khatib Sulaiman No. 5 Padang

DAFTAR ISI

| | | |
|-------------|--|----|
| I. | PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN | |
| | A. Capaian Pelaksanaan Program..... | 1 |
| | B. Outcome Program..... | 29 |
| | C. Capaian Indikator Kinerja Daerah..... | 43 |
| | D. Permasalahan dan Solusi | 43 |
| | E. Penghargaan Nasional yang Diterima | 44 |
| | F. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Tahun 2018 | 44 |
| II. | PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN DEKONSENTRASI | |
| | A. Tugas Pembantuan yang Diterima | |
| | 1. Dasar Hukum | 48 |
| | 2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan | 48 |
| | 3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Melaksanakan | 48 |
| | 4. Program dan Kegiatan yang Diterima dan Pelaksanaannya | 48 |
| | 5. Sumber dan Jumlah Anggaran | 48 |
| | 6. Permasalahan dan Solusi | 49 |
| | B. Tugas Dekonsentrasi yang Diterima | |
| | 1. Dasar Hukum | 50 |
| | 2. Instansi Pemberi Tugas Dekonsentrasi | 50 |
| | 3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Melaksanakan | 50 |
| | 4. Program dan Kegiatan yang Diterima dan Pelaksanaannya | 51 |
| | 5. Sumber dan Jumlah Anggaran | 51 |
| | 6. Permasalahan dan Solusi | 53 |
| III. | PENUTUP | |
| | 1. Kesimpulan | 54 |
| | 2. Saran | 54 |

BAB I

PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

A. Capaian Pelaksanaan Program

Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat sebagai salah satu instansi penyelenggara pemerintahan dan pembangunan mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang sosial. Dalam menyelenggarakan tugas dimaksud, maka Dinas Sosial mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis bidang sosial;
2. Penyelenggaran urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang sosial;
3. Pembinaan dan fasilitas bidang sosial lingkup provinsi dan kabupaten/kota;
4. Pelaksanaan kesekretariatan dinas;
5. Pelaksanaan tugas di bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Rehabilitas Sosial, Pemberdayaan Sosial, dan Penanganan Fakir Miskin;
6. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang sosial; dan
7. Pelaksanaan tugas yang lain diberikan oleh gubernur sesuai tugas dan fungsinya.

1. Program dan Kegiatan

Berdasarkan kewenangan dan arah kebijakan umum pembangunan bidang kesejahteraan sosial, Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2019 yang tertuang dalam dokumen RPJMD 2016-2021, kegiatan pembangunan bidang kesejahteraan sosial mencakup pada 15 (lima belas) program, yang terdiri atas 5 program rutin dan 10 program wajib urusan sosial.

Adapun Program dan Kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

a) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

Program ini terdiri dari 13 (tiga belas) kegiatan yang dipergunakan untuk memenuhi belanja pelayanan perkantoran selama 1 tahun. Kegiatan dimaksud sebagai berikut :

- 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
- 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik;
- 3) Penyediaan Jasa Kebersihan, Pengamanan dan Sopir Kantor;

- 4) Penyediaan Alat Tulis Kantor;
- 5) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
- 6) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
- 7) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
- 8) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan;
- 9) Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
- 10) Penyediaan Makanan dan Minuman;
- 11) Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah;
- 12) Penyediaan Jasa Informasi, Dokumentasi dan Publikasi;
- 13) Penyediaan Jasa Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur.

b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

Mencakup 13 (tiga belas) kegiatan sebagai berikut :

- 1) Pengadaan Meubeleur;
- 2) Pengadaan Komputer dan Jaringan Komputerisasi;
- 3) Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Studio, Alat Komunikasi dan Alat Informasi;
- 4) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor;
- 5) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional;
- 6) Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer dan Jaringan Komputerisasi;
- 7) Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor;
- 8) Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi dan Jaringan;
- 9) Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan;
- 10) Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional;
- 11) Pengadaan Peralatan/Perlengkapan Gedung Kantor;
- 12) Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan/Perlengkapan Gedung Kantor;
- 13) Pemeliharaan Rutin/Berkala Monumen dan Bangunan Sejarah.

c) Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Program ini berisikan satu kegiatan, yakni Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya untuk PNS Dinas Sosial dan UPTD

d) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program ini berisi kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan yang bertujuan untuk meningkatkan Sumber Daya

Aparatur Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat, yakni Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan;

e) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan kegiatan sebagai berikut :

- 1) Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD;
- 2) Penatausahaan Keuangan SKPD;
- 3) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD;
- 4) Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan SKPD;
- 5) Penyusunan Sinergitas Program Antar Kab/Kota;
- 6) Pengelolaan, Pengawasan, dan Pengendalian Aset SKPD.

f) Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial dengan kegiatan sebagai berikut :

- 1) Bimbingan Teknis Satuan Bakti Pekerja Sosial

Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan meningkatkan kualitas Satuan Bakti Pekerja Sosial dalam melaksanakan tugas sebagai pilar-pilar pembangunan kesejahteraan sosial ditengah masyarakat. Kegiatan ini diikuti oleh 50 orang Sakti Peksos dari Kab/ Kota.

- 2) Sosialisasi Kegiatan Unit Institusi Layanan Sosial (UILS)

Tujuan kegiatan ini adalah bertambahnya pengetahuan dinas terkait pada kabupaten/kota dan lembaga kemasyarakatan terkait tentang Unit Institusi Layanan Sosial (UILS); terwujudnya hak penyandang disabilitas mental untuk mendapatkan keterampilan, pengetahuan dan bimbingan sosial, ekonomi dan budaya, sesuai dengan anamat Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas; terwujudnya kepedulian, kesempatan dan peluang bagi pemerintah, pemerintah daerah, profesi pekerjaan sosial dan berbagai profesi yang relevan serta masyarakat luas dalam pengembangan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas mental; terwujudnya pemahaman masyarakat tentang permasalahan penyandang disabilitas mental, termasuk upaya deteksi dini dan penanganannya berbasis masyarakat. Jumlah peserta kegiatan ini adalah 60 orang.

- 3) Rujukan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;

Adapun bentuk kegiatan yaitu Rujukan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial berupa pemberian rujukan terhadap penyandang masalah

kesejahteraan sosial se-Sumatera Barat yang dikirim ke Panti Sosial yang berada di Provinsi Bengkulu guna menjalani rehabilitasi dan pembinaan.

- 4) Sosialisasi Program Penanganan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH); Anak yang berkonflik dengan hukum selanjutnya disebut sebagai anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Perlindungan anak-anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), merupakan tanggung jawab bersama aparat penegak hukum. Tidak hanya anak sebagai pelaku, namun mencakup juga anak yang menjadi korban dan saksi. Aparat penegak hukum yang terlibat dalam penanganan ABH adapat mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atau peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan penanganan ABH. Kegiatan ini diikuti oleh 50 orang peserta.

g) Program Pembinaan Anak Terlantar

Anak Terlantar merupakan penyebab dominan dari ketidakmampuan orang tua yang tidak dapat menjalankan kewajibannya sehingga kebutuhan anak tidak dapat terpenuhi dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Selain itu, akibat orang tua/dan/atau keluarga yang tidak dapat memenuhi kebutuhan anaknya dengan pelbagai alasan menjadikan anak-anak mereka terlantar. Dikategorikan anak terlantar apabila :

- 1) Seseorang berusia 5 – 18 tahun;
- 2) Anak yatim, piatu, yatim piatu maupun masih mempunyai kedua orang tua;
- 3) Tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya; dan
- 4) Anak yang lahir karena pemerkosaan, tidak ada yang mengurus dan tidak mendapatkan pendidikan.

Adapun kegiatan pada Program ini sebagai berikut :

- 1) Biaya Pendidikan Klien (PSAA Tri Murni);
Pengadaan biaya pendidikan bagi 100 orang anak perempuan klien PSAA Tri Murni terdiri dari belanja peralatan/ perlengkapan, uang sekolah klien dan uang saku klien. Biaya pendidikan dimaksudkan agar kebutuhan pendidikan untuk 1 tahun terpenuhi.

2) Tim PIPA (Pertimbangan Izin Pengangkatan Anak)

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah wadah koordinasi lintas instansi secara terpadu dan komprehensif untuk memberikan verifikasi terhadap anak yang akan dijadikan anak angkat oleh calon orang tua angkat dan agar terjalinnnya koordinasi dengan instansi terkait dalam izin pengangkatan anak. Sasaran kegiatan ini adalah 25 orang.

3) Pengadaan Kelengkapan Klien;

Pengadaan kelengkapan klien pada PSAABR Budi Utama Lubuk Alung, PSAA Tri Murni, dan PSBR Harapan Padang Panjang sejumlah 455 orang klien terdiri dari 155 orang anak laki-laki dan 300 orang anak perempuan. Kegiatan ini untuk membiayai kebutuhan harian, kebutuhan pakaian sekolah dan penyediaan kebutuhan materi (uang jajan dan uang saku) bagi anak asuh serta anak yang mendapatkan pelayanan keterampilan.

4) Pengadaan bahan Obat-obatan dan Dokter Pakai Habis;

Penyediaan bahan obat-obatan dan dokter pakai habis, telah dilaksanakan selama 1 tahun pada PSAABR Budi Utama Lubuk Alung, PSAA Tri Murni dan PSBR Harapan Padang Panjang, adapun obat-obatan yang disediakan adalah obat-obatan ringan beserta masing-masing seorang tenaga medis.

5) Pelatihan Keterampilan dan Praktik Belajar bagi Anak Terlantar (PSAABR Budi Utama Lubuk Alung);

Kegiatan ini dimaksudkan agar anak terlantar laki-laki kurang mampu yang putus sekolah dapat dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan sehingga dapat hidup mandiri. Kegiatan ini dilaksanakan selama 1 tahun untuk 2 angkatan (160 orang) dengan masing-masing angkatan berjumlah 80 orang terdiri dari:

- Jurusan Otomotif = 40 orang
- Jurusan elektronika = 40 orang
- Jurusan Las Karbit/Listrik = 40 orang
- Jurusan Instalasi Listrik = 40 orang

6) Seleksi Penerimaan Calon Klien;

Seleksi penerimaan calon klien dimaksudkan agar klien yang akan diterima pada Panti Sosial PSAABR Budi Utama Lubuk Alung, PSAA Tri Murni, dan

PSBR Harapan Padang Panjang telah memenuhi kriteria dan persyaratan yang ditetapkan. Kegiatan ini dilaksanakan terhadap 65 orang anak.

7) Penyediaan Bahan Pendidikan;

Penyediaan bahan pendidikan bagi klien PSABR Budi Utama Lubuk Alung, bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak asuh sebanyak 75 orang anak selama 1 tahun.

8) Pendidikan dan Pelatihan bagi Penghuni Panti (PSAABR Budi Utama Lubuk Alung);

Pendidikan dan pelatihan anak asuh bagi 75 orang klien PSAABR Budi Utama Lubuk Alung dimaksudkan agar anak asuh yang dibina dan dilayani mendapatkan peningkatan pendidikan yang lebih baik dan mendapat pelatihan dalam rangka peningkatan kapasitas diri sebagai bekal setelah dari Panti Sosial.

9) Rapat Koordinasi Pelayanan dan Rehabilitasi Kesos Anak;

Rapat Koordinasi Pelayanan dan Rehabilitasi Kesos Anak, bertujuan untuk menyampaikan informasi tentang Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Anak khususnya Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA), Program Kesejahteraan Sosial Bagi Anak Yang Membutuhkan Perlakuan Khusus (AMPK), serta untuk terjalinnya koordinasi antar pengurus panti sosial swasta dengan petugas Dinas Sosial Kab/Kota. Sasaran pada kegiatan ini berjumlah 125 orang.

10) Pengadaan Makanan dan Minuman;

Pengadaan makanan dan minuman (biaya makan klien) selama 1 tahun pada PSAABR Budi Utama Lubuk Alung, PSAA Tri Murni dan PSBR Harapan Padang Panjang sebanyak 455 orang terdiri dari 155 orang laki-laki, 300 orang perempuan.

11) Pelatihan Keterampilan dan Praktik Belajar bagi Anak Terlantar (PSBR Harapan Padang Panjang);

Pelatihan Keterampilan dan Praktik Belajar Bagi Anak Terlantar di PSBR Harapan Padang Panjang, dimaksudkan agar anak terlantar perempuan kurang mampu yang putus sekolah terpenuhi kebutuhan untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan/ keahlian sehingga dapat hidup mandiri dengan norma dan etika. Kegiatan ini dilaksanakan selama 1 tahun

untuk 2 angkatan (200 orang anak perempuan) dengan masing-masing angkatan berjumlah 100 orang terdiri dari :

- Jurusan Kostum
- Jurusan Bordir

12) Sehari Bersama Anak;

Sehari Bersama Anak, adalah perwujudan dari Keppres Nomor 4 tahun 1984 tentang Hari Anak Nasional seiring dengan ditetapkannya UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka peringatan Hari Anak Nasional tahun 2019 merupakan momentum yang tepat untuk menggugah dan membangkitkan segenap komponen bangsa (pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua) akan pentingnya perlindungan dan pemenuhan hak anak, termasuk pemenuhan layanan perlindungan dan kesejahteraannya. Untuk tahun anggaran 2019 jumlah sasaran kegiatan ini sebanyak 200 orang.

Tujuan umum peringatan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan peran serta masyarakat dan swasta bersama dengan pemerintah dalam menyelenggarakan upaya pembinaan dan pengembangan anak secara integratif holistik dan berkesinambungan serta meningkatkan kesadaran pemerintah, masyarakat, orang tua dan segenap komponen bangsa untuk memenuhi hak-hak anak berdasarkan *Child Right*, dan menghindari anak-anak dari penyiksaan, penelantaran, eksploitasi kekerasan terhadap anak, diskriminasi, pemakaian obat-obatan terlarang, pornografi, dan lain-lain.

13) Pendidikan dan Pelatihan bagi Penghuni Panti (PSAA Tri Murni);

Pendidikan dan pelatihan bagi 100 orang anak perempuan klien PSAA Tri Murni dimaksudkan agar anak asuh yang dibina dan dilayani mendapatkan peningkatan pendidikan yang lebih baik dan mendapat pelatihan dalam rangka peningkatan kapasitas diri sebagai bekal setelah dari Panti Sosial.

h) Program Pembinaan Para Penyandang Disabilitas dan Eks Trauma

Penyandang cacat (disabilitas) adalah seseorang yang mengalami hambatan fisik mental atau fisik dan mental sehingga mengganggu pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar yang terdiri dari: penyandang cacat fisik, penyandang cacat mental, penyandang cacat fisik dan

mental. Pembinaan para panyandang cacat dilaksanakan secara sistem panti dengan tujuan agar dapat menjamin dan melindungi penyandang disabilitas dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

1) Penyediaan bahan Obat-obatan dan Dokter Pakai Habis;

Penyediaan bahan obat-obatan dan dokter pakai habis, pada PSBG Harapan Ibu Padang dan PSBN Tuah Sakato Padang, dilaksanakan selama 1 tahun untuk 150 orang anak berupa penyediaan obat-obatan ringan serta penyediaan seorang tenaga medis yang ditunjuk oleh Puskesmas setempat.

2) Rehabilitasi Sosial Terhadap Penyandang Disabilitas melalui Loka Bina Karya (LBK).

Salah satu upaya rehabilitasi sosial terhadap penyandang disabilitas yang dilakukan pemerintah adalah dengan melaksanakan program pelayanan Sosial Penyandang Disabilitas melalui dua pendekatan, yaitu melalui program pelayanan dalam panti dan program pelayanan luar panti. Kedua program ini berjalan secara beriringan disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi Penyandang Disabilitas. Rehabilitasi sosial terhadap penyandang disabilitas melalui Loka Bina Karya pada tahun 2019 diberikan kepada 15 orang peserta.

3) Biaya Kelengkapan Klien;

Biaya kelengkapan klien pada PSBG Harapan Ibu Padang dan PSBN Tuah Sakato Padang dengan jumlah kelayan 150 orang anak untuk 1 tahun, biaya kelengkapan ini dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan harian kelayan, kebutuhan praktek dan penyediaan kebutuhan ekstra kurikuler (olahraga, kesenian, pramuka).

4) Pemberian Penghargaan bagi Tokoh yang Peduli pada Penyandang Disabilitas;

Kegiatan ini merupakan apresiasi terhadap masyarakat yang peduli terhadap keberadaan para penyandang disabilitas. Pada tahun ini diberikan penghargaan kepada 54 orang tokoh masyarakat.

5) Pendayagunaan para Penyandang Disabilitas;

Pendayagunaan para penyandang disabilitas yang dilaksanakan di PSBG Harapan Ibu Padang kepada 100 orang klien (50 orang laki-laki dan 50 orang perempuan) selama 1 tahun, salah satu tujuan dari kegiatan ini adalah untuk dapat mendukung pemenuhan kebutuhan sosial, fisik, mental dan keterampilan bagi anak retardasi mental yang mampu didik dan mampu latih sehingga mereka bisa hidup mandiri di tengah-tengah keluarga dan masyarakat, disamping itu sasaran kegiatan ini juga bagi orang tua kelayan agar mereka dapat melanjutkan proses pelayanan dan rehabilitasi serta pembinaan lanjut sebagai upaya dan rasa tanggungjawab keluarga.

6) Pendidikan dan Pelatihan bagi Penyandang Disabilitas;

Pendidikan dan Pelatihan Bagi Penyandang Disabilitas dan Eks Trauma, dilaksanakan selama 1 tahun di Panti Sosial Bina Netera “Tuah Sakato” Padang untuk klien yang berjumlah 50 orang (36 laki-laki dan 14 perempuan), tujuan dari pelatihan ini adalah untuk membina dan memperbaiki sikap mental para penyandang cacat netra dari sifat konsumtif kepada sifat produktif, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan para penyandang cacat netra sebagai modal dasar dalam menjalani kehidupan ditengah-tengah masyarakat serta untuk terbina dan terentasnya penyandang cacat netra sehingga mampu melaksanakan fungsi sosialnya dalam tatanan kehidupan sehari-hari.

Pelatihan yang diberikan berupa pembinaan KUBE dengan memberikan bimbingan, metode dan teknis pelayanan prima kepada pasien serta pembinaan pengelolaan klinik pijat dan pengadministrasian keuangan yang baik.

7) Penguatan Motivasi Penyandang Disabilitas.

Penguatan motivasi penyandang disabilitas bertujuan untuk memberikan motivasi sosial bagi masyarakat terhadap penyandang disabilitas dengan jumlah sasaran 150 orang.

8) Bimbingan Sosial bagi PSM/ TKSK;

Bimbingan Sosial ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memberikan pencerahan kepada 68 orang pendamping agar petugas dari kabupaten/ kota selaku petugas pelaksana dan pendamping memahami tentang

kriteria penerima bantuan dan tatacara pendampingan terhadap penerima bantuan jaminan sosial/ asistensi sosial terhadap penyandang disabilitas berat.

9) Biaya Makan dan Minum Klien;

Biaya makanan dan minuman klien yang dilaksanakan selama 1 tahun pada PSBG Harapan Ibu Padang dan PSBN Tuah Sakato Padang, dengan jumlah klien 150 orang terdiri dari 92 orang laki-laki dan 58 orang perempuan.

i) Program Pembinaan Panti Lanjut Usia Terlantar

Panti asuhan lansia adalah lembaga kesejahteraan sosial yang mempunyai tugas memberikan bimbingan dan pelayanan bagi lanjut usia terlantar agar dapat hidup secara wajar dalam kehidupan bermasyarakat (Kepmensos No. 50/HUK/2004).

Adapun kegiatan program ini sebagai berikut :

1) Penyediaan bahan Obat-obatan dan Dokter Pakai Habis;

Penyediaan bahan obat-obatan Jompo, dilaksanakan selama 1 tahun pada PSTW Sabai Nan Aluih Sicincin dan PSTW Kasih Sayang Ibu Batusangkar sebanyak 180 orang. Adapun obat-obat yang disediakan berupa obat-obatan ringan dan penyediaan seorang tenaga medis yang ditunjuk.

2) Biaya Jasa Penguburan/Pemulangan Klien;

Biaya Jasa Penguburan / Pemulangan Klien, pada PSTW Sabai Nan Aluih Sicincin dan PSTW Kasih Sayang Ibu Batusangkar selama 1 tahun, yang dipergunakan untuk biaya penguburan dan pemulangan kelayan kepada keluarganya setelah mengikuti pendidikan dan pelatihan di dalam panti.

3) Lanjut Usia Berkreasi.

Lanjut Usia Berkreasi bertujuan:

- a) Untuk melembaganya nilai-nilai masyarakat agar selalu menghargai keberadaan lanjut usia.
- b) Meningkatnya kesadaran para lanjut usia, keluarga dan masyarakat akan arti pentingnya makna kehidupan berbangsa dan bernegara melalui berbagai kegiatan terpadu antara masyarakat dan pemerintah dalam rangka meningkatkan kualitas kesejahteraan sosial.

- c) Termotivasinya dan Bergeraknya lanjut usia, keluarga, organisasi sosial, masyarakat dan dunia usaha dan upaya meningkatkan kesejahteraan lanjut usia dengan mengembangkan jiwa dan semangat kebersamaan keluarga lanjut usia.
- d) Adapun sasaran kegiatan ini sejumlah 250 orang.
- 4) Pendidikan dan Pelatihan bagi Penghuni Panti Jompo;
Pendidikan dan Pelatihan bagi penghuni panti jompo, di PSTW Sabai Nan Aluih Sicincin dan PSTW Kasih Sayang Ibu Batusangkar dengan jumlah klien 180 orang (106 orang laki-laki dan 74 orang perempuan). Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan bimbingan mental, sosial, keterampilan dan kesenian kepada para lanjut usia terlantar agar mereka dapat menjalani hari tuanya dengan kegiatan yang bermanfaat serta untuk menumbuhkan rasa percaya diri.
- 5) Biaya Kelengkapan Klien Panti Jompo;
Biaya kelengkapan klien panti jompo, pada PSTW Sabai Nan Aluih Sicincin dan PSTW Kasih Sayang Ibu Batusangkar dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan harian serta memenuhi bahan pelatihan kelayan lanjut usia, dengan tujuan agar lanjut usia terlantar dapat mengisi hari-hari tuanya dengan kegiatan yang bermanfaat, dilaksanakan selama 1 tahun untuk 180 orang klien terdiri dari 106 orang laki-laki dan 74 orang perempuan.
- 6) Biaya Makanan dan Minimum Klien di Panti Jompo;
Biaya makan dan minum kelayan Jompo, pada PSTW Sabai Nan Aluih Sicincin dan PSTW Kasih Sayang Ibu Batusangkar, berjumlah 110 orang di PSTW Sabai Nan Aluih Sicincin dan 70 orang di PSTW Kasih Sayang Ibu Batusangkar yang dilaksanakan selama 1 tahun.

j) Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya) dengan kegiatan sebagai berikut :

- 1) Pengadaan Kelengkapan Klien;
Pengadaan kelengkapan (biaya klien) dilaksanakan selama 1 tahun untuk di PSKW Andam Dewi Sukarami Solok yang berjumlah 40 orang, kegiatan ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan harian klien.

- 2) Biaya Obat-obatan dan Dokter Pakai Habis;
Biaya obat-obatan, dilaksanakan selama 1 tahun pada PSKW Andam Dewi dengan penyediaan obat-obatan ringan serta tenaga medis, banyaknya sasaran kegiatan ini 40 orang klien.
- 3) Pengadaan Makanan dan Minuman;
Pengadaan makanan dan minuman pada PSKW Andam Dewi Sukarami Solok selama 1 tahun untuk 40 orang.
- 4) Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan berusaha bagi Eks Penyandang Penyakit Sosial;
Pendidikan dan Pelatihan keterampilan berusaha bagi eks penyakit sosial pada PSKW Andam Dewi Solok, kegiatan ini bertujuan untuk memulihkan dan mengembangkan tingkah laku positif eks Wanita Tuna Susila sehingga mereka mau dan mampu melakukan fungsi dan peran sosialnya secara wajar serta meningkatkan ketahanan sosial warga binaan terhadap pengaruh buruk lingkungan dengan memberikan bekal agama dan norma etika sehingga warga binaan dapat menjalankan kehidupan dengan baik sesuai dengan kaidah agama dan etika.

k) Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

Kelembagaan Kesejahteraan Sosial merupakan Organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum (UU No.11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial).

Adapun kegiatan program ini sebagai berikut:

- 1) Bimbingan Kapasitas bagi Pengurus Karang Taruna se-Sumatera Barat;
Sasaran kegiatan ini sejumlah 1.811 orang dengan tujuan membekali kemampuan dan keberfungsian Karang Taruna dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai potensi dan sumber kesejahteraan sosial di tengah masyarakat.
- 2) Penilaian PSKS (Karang Taruna, Orsos, PSM, TKSK) berprestasi Tingkat Sumatera Barat;
Penilaian PSKS (Karang Taruna, Orsos, PSM, TKSK) Berprestasi Tk. Sumatera Barat bertujuan :

- a) Untuk meningkatkan motivasi dan etos kerja PSKS dalam mengemban misi dan kontribusi bidang pengembangan kesejahteraan sosial di lapangan;
- b) Melihat sejauh mana dedikasi dan prestasi pada PSKS dalam melaksanakan pembangunan kesejahteraan sosial; dan
- c) Untuk menentukan PSKS yang berprestasi Tk. Sumatera Barat.

Sasaran kegiatan ini berjumlah 32 orang.

- 3) Pertemuan Forum Komunikasi Pekerja Sosial Masyarakat (FK-PSM) se-Sumatera Barat.

Kegiatan ini bertujuan agar PSM se-Sumatera Barat saling berbagi pengalaman dan menyampaikan permasalahan yang dihadapi serta solusi bagi mereka dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, dimana kegiatan ini diikuti oleh 50 orang.

- 4) Bimbingan Kapasitas bagi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan se-Sumatera Barat;

Sasaran kegiatan ini sejumlah 50 orang dengan tujuan membekali kemampuan para TKSK dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai potensi dan sumber kesejahteraan sosial di tengah masyarakat.

- 5) KSN Expo dan Award dalam HKSAN;

KSN Expo dan Award Dalam HKSAN, bertujuan sebagai media publikasi dan promosi berbagai pihak, instansi pemerintah, dunia usaha, organisasi non pemerintah/LSM, dunia pendidikan dan pelaku usaha lain yang melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagai bentuk upaya menuju Indonesia sejahtera.

- 6) Pelatihan Lanjutan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) se-Sumatera Barat;

Kegiatan ini dilakukan untuk meningkatkan kemampuan Pekerja Sosial Masyarakat dalam menjalankan fungsinya. Kegiatan ini diikuti oleh 165 orang PSM se-Sumatera Barat.

- 7) Penguatan Nilai-Nilai KSN;

Penguatan Nilai-nilai KSN tahun 2019, yang jatuh pada tanggal 20 Desember setiap tahunnya merupakan momentum untuk menumbuhkembangkan dan melestarikan nilai-nilai kesetiakawanan sosial untuk didayagunakan sehingga menjadi bagian dari sikap dan perilaku

sehari-hari bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta mendayagunakan peran aktif masyarakat luas khususnya masyarakat mampu secara melembaga dan berkelanjutan untuk mengatasi dan menanggulangi permasalahan sosial. Pelaksanaan kegiatan ini dalam bentuk pertandingan olah raga yang diikuti oleh 800 orang peserta dengan tema “Kesetiakawanan Sosial Menembus Batas.”

- 8) Bimbingan Jejaring Kerja LKS/ Orsos se-Sumatera Barat dalam rangka Akreditasi.

Kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kemampuan pengurus LKS/Orsos sejumlah 50 orang di bidang administrasi manajemen orsos dan bidang pelayanan sosial. Tujuan kegiatan ini adalah :

- a) Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan pengurus LKS/Orsos dalam pengelolaan manajemen kualitas pelayanan kepada masyarakat;
- b) Meningkatnya kinerja LKS/Orsos dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya menuju kemandirian;
- c) Terwujudnya administrasi LKS/Orsos dengan baik; dan
- d) Terhimpunnya LKS/Orsos yang di akreditasi dan diusulkan pada Badan Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial RI di Jakarta.

- 9) Penguatan Peran LKS Posdaya dalam Penanggulangan Kemiskinan dan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;

Tujuan kegiatan ini adalah untuk menanggulangi masalah sosial seperti kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat sehingga masyarakat akan mampu menyelesaikan masalah sosial di lingkungannya sendiri secara bersama-sama, dan bahkan diharapkan dapat secara bersama-sama pula mengembangkan potensi diri sehingga dapat diwujudkan masyarakat maju dan berkembang. Jumlah sasaran sebanyak 640 orang.

- 10) Penguatan Kelembagaan LKKS Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat;

Penguatan Kelembagaan Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial Sosial (LKKS) se-Sumatera Barat bertujuan memberikan motivasi kepada pengurus LKKS Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam membina dan

mengkoordinasikan kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Sasaran kegiatan sejumlah 180 orang pengurus.

11) Penyuluhan Kesejahteraan Sosial;

Penyuluhan Kesejahteraan Sosial, dilaksanakan bertujuan untuk menyebarluaskan informasi, komunikasi, inovasi dan edukasi melalui media cetak, media elektronik dan televisi terhadap kelompok sasaran ke arah yang lebih baik serta untuk terwujudnya pemahaman yang sama kepada para pelaku program penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam pelaksanaan penyuluhan sosial guna mendukung keberhasilan program-program dari kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Sasaran kegiatan ini berjumlah 3.260 orang.

12) Forum Komunikasi Pengurus Karang Taruna se-Sumatera Barat;

Kegiatan ini diikuti oleh 50 orang pengurus Karang Taruna se-Sumatera Barat. Tujuannya untuk meningkatkan koordinasi pengurus Karang Taruna di Sumatera Barat dalam melaksanakan kegiatan kesejahteraan sosial.

13) Pelatihan Dasar Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) se-Sumatera Barat;

Kegiatan ini dilakukan untuk meningkatkan kemampuan Pekerja Sosial Masyarakat dalam menjalankan fungsinya. Kegiatan ini diikuti oleh 685 orang PSM se-Sumatera Barat.

14) Penguatan Peran Pilar dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;

Koordinasi dilaksanakan dengan 19 Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat untuk menguatkan Jejaring Kerja Lembaga kesejahteraan sosial dan temu koordinasi kesejahteraan sosial yang diikuti oleh 180 orang peserta.

15) Bimbingan Pengurus Organisasi Sosial se-Sumatera Barat;

Bimbingan bagi Pengurus Organisasi Sosial se Sumatera Barat bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan pengurus orsos dalam mengelola manajemen kualitas pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan kinerja orsos dalam melaksanakan tugas dan fungsi menuju kemandirian serta mewujudkan administrasi orsos dengan baik. Sasaran kegiatan ini berjumlah 50 orang.

m) Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya dengan kegiatan sebagai berikut :

- a. Penetapan Calon Lokasi Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT);
Pemberdayaan Komunitas Adat terpencil (PKAT) merupakan salah satu bentuk kepedulian dan komitmen pemerintah dalam mempercepat proses pembangunan terhadap mereka yang masih belum tersentuh proses Pembangunan Nasional yang umumnya berada pada daerah-daerah yang sulit dijangkau. Fokus perhatian Pemberdayaan KAT adalah mereka yang berada di daerah terpencil baik secara geografis, sosial budaya, ekonomi maupun politik. Beberapa tahapan yang dilakukan dalam Pemberdayaan KAT berupa:
 - 1) Penjajagan Awal, tujuannya adalah untuk (1) menemukan sekaligus menghimpun data etnologi KAT dalam suatu wilayah untuk mendapatkan data awal tentang Komunitas Adat Terpencil, (2) Menghimpun data potensi dan sumber daya alam serta sumber daya manusia, dan (3) Menetapkan katagori Komunitas Adat terpencil sesuai dengan kriteria dan kenyataan di lapangan.
 - 2) Semiloka Daerah Hasil Studi Kelayakan bertujuan untuk memperoleh masukan bentuk kegiatan Pemberdayaan KAT dan dukungan keterpaduan program dari Dinas/Instansi terkait serta masyarakat maupun Perguruan Tinggi sebagai acuan pelaksanaan pemberdayaan selanjutnya serta membahas kelayakan lokasi sebagai suatu calon lokasi Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil di Sumatera Barat tahun 2019.
- b. Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
Pengukuran kepuasan masyarakat merupakan elemen penting dalam menyediakan pelayanan yang efektif, efisien, dan inovatif. Hal ini sangat esensial karena berhubungan dengan pelayanan publik. Hal yang diharapkan dari kegiatan ini adalah didapatkannya gambaran tentang tingkat kepuasan dan pendapat masyarakat atas pelayanan kesejahteraan sosial yang telah diperoleh.

Berdasarkan hasil Survei Kepuasan Masyarakat pada Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat maka pelayanan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat sudah masuk dalam kategori mutu pelayanan B atau Baik.

c. Pengkajian Gelar Calon Pahlawan Nasional

Kegiatan ini bertujuan untuk mengkaji dan memverifikasi tokoh yang akan diusulkan untuk diberi gelar calon pahlawan nasional. Pengkajian melibatkan perguruan tinggi dan akademisi/ sejarawan. Calon yang diusulkan berjumlah 3 orang.

d. Pelayanan Orang Terlantar;

Kegiatan ini dialokasikan untuk pemulangan orang terlantar sejumlah 38 orang dalam 1 tahun anggaran.

e. Sumatera Barat Expo 2019 (Publikasi Pembangunan Kesejahteraan Sosial)

Kegiatan ini dilakukan untuk mempublikasi kegiatan pembangunan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Pada tahun ini kegiatan diselenggarakan di Medan, Sumatera Utara.

f. Bimbingan Pemantapan Pengurus LK3 Kab/Kota;

Bimbingan Pemantapan Pengurus LK3 Kab/Kota, bertujuan untuk meningkatkan kinerja Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kab/Kota dan LK3 Berbasis Masyarakat agar lebih profesional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sebagai tempat layanan informasi, konsultasi rujukan dalam penanganan permasalahan keluarga sesuai dengan kebutuhan, serta sebagai bahan evaluasi bagi Dinas Sosial dari segi mana LK3 masih memiliki kelemahan / kendala dalam melaksanakan Usaha Kesejahteraan Sosial, sehingga dapat dijadikan bahan penyusunan program serta langkah-langkah Pemberdayaan Keluarga selanjutnya. Sasaran kegiatan ini sebanyak 50 orang pengurus LK3.

g. Bimbingan dan Pelatihan Keterampilan Berusaha Bagi Komunitas Adat Terpencil;

Bimbingan dan Pelatihan Keterampilan Berusaha bagi Komunitas Adat Terpencil, dilaksanakan dalam rangka menciptakan warga dampingan dan petugas pendamping serta masyarakat eks warga yang terampil mandiri, dalam berusaha guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dengan

memanfaatkan bahan alam yang ada di sekitar kebun dan tanaman masyarakat tersebut. Kegiatan ini diikuti oleh 30 KK warga KAT.

h. Bimbingan Teknis Pemantapan Petugas Pendata PMKS

Kegiatan ini diikuti oleh 96 orang TKSK dari Kabupaten/Kota. Tujuannya adalah agar petugas pendata dapat meningkatkan kinerjanya dalam melakukan pendataan PMKS yang ada di Sumatera Barat.

i. Sosialisasi Undian Berhadiah Gratis (UGB)

Sosialisasi dilaksanakan pada petugas yang menangani UGD pada Dinas Sosial Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat bertujuan meningkatkan pemahaman tentang UGB dengan jumlah sasaran 25 orang.

j. Bimbingan Keterampilan Berusaha bagi Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE);

Bimbingan keterampilan bagi keluarga rentan dan WRSE di Sumatera Barat, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan manajemen usaha keluarga (KK) rentan miskin dalam mengelola dan mengembangkan usahanya sehingga dapat membantu mereka dalam memenuhi kebutuhan pokok mereka sehari-hari. Kegiatan ini diikuti oleh 15.890 orang.

k. Pembuatan Buku Data PMKS dan PSKS

Kegiatan ini bertujuan untuk membuat dokumentasi tentang populasi PMKS dan PSKS yang lengkap, akurat, dan mutakhir sebagai bahan masukan untuk membuat perencanaan dan mengambil keputusan.

n) Program Penanganan Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial

Adapun kegiatan pada program ini sebagai berikut:

a. Bantuan Logistik Bencana;

Kegiatan ini berupa penyediaan logistik bencana yang didistribusikan kepada Dinas Sosial Kab/Kota se-Sumatera Barat dalam bentuk baper stock.

b. Rakor Bencana Sosial

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi ASN dan masyarakat dalam menangani bencana sosial yang terjadi. Kegiatan ini diikuti oleh 59 orang peserta.

- c. Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Logistik Bencana Sosial
Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan ASN dan masyarakat dalam menyusun laporan logistik bencana sosial. Kegiatan ini diikuti oleh 45 orang peserta.
- d. Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Logistik Bencana Sosial
Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan ASN dan masyarakat dalam menyusun laporan logistik bencana alam. Kegiatan ini diikuti oleh 60 orang peserta.
- e. Rapat Koordinasi Program Keluarga Harapan;
Program Keluarga harapan (PKH) adalah program bantuan social bersyarat (*conditional cash transfer*) yang diberikan kepada keluarga miskin yang memiliki kondisional kesehatan dan pendidikan. Kegiatan PKH bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan kesenjangan, mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan, meningkatkan taraf hidup KPM melalui akses layanan pendidikan dan kesehatan, mendorong perubahan perilaku dan kemandirian KPM dalam hidup sehat dan pendidikan berkelanjutan, dan mendorong inklusi keuangan bagi masyarakat miskin.
Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatnya koordinasi pendamping dan operator PKH di Kab/Kota sejumlah 35 orang.
- f. Pemantapan Tim Psikososial Korban Bencana Alam;
Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan Tim Psikososial Korban bencana Alam sejumlah 50 orang.
- g. Pemantapan Tim TRC Bencana Alam;
Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan Tim TRC Bencana Alam sejumlah 50 orang. Pemantapan Tim TRC Bencana Alam;
- h. Sinergitas Program Keluarga Harapan;
Kegiatan ini diikuti oleh 76 orang koordinator pendamping PKH dan operator Kab/Kota se-Sumatera Barat.
- i. Peningkatan Capacity Building Program Keluarga Harapan;
Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pendamping dan operator PKH di Kab/Kota sejumlah 76 orang

o) Program Pemberdayaan Fakir Miskin

- a. Bimbingan Teknis Petugas Verifikasi dan Validasi BDT
Kegiatan ini diikuti oleh 57 orang petugas verifikasi dan validasi BDT dari Kabupaten/Kota. Tujuannya adalah agar petugas dapat meningkatkan akurasi dalam melakukan Verifikasi dan Validasi BDT yang ada di Sumatera Barat.
- b. Pengadaan Beras Untuk Panti Swasta se-Sumatera Barat;
Pengadaan Beras Untuk Panti Sosial Swasta bertujuan membantu Panti Sosial swasta dalam memenuhi kebutuhan dasar pangan bagi para penyandang masalah kesejahteraan sosial di dalam Panti dengan jumlah penerima sejumlah 4.000 orang.
- c. Bimbingan Pemantapan Pendamping Bantuan Pangan Non Tunai
Kegiatan ini diikuti oleh 60 orang Pendamping Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dari Kabupaten/Kota. Tujuannya adalah agar pendamping dapat melakukan pendampingan dalam penyaluran BPNT di Sumatera Barat.
- d. Seleksi Penghargaan KUBE dan Pendamping KUBE Berprestasi;
Seleksi dan Penghargaan KUBE dan Pendamping KUBE Berprestasi, merupakan media untuk meningkatkan motivasi pendamping dan warga miskin untuk lebih maju secara ekonomi dan sosial, meningkatkan interaksi dan kerjasama dalam kelompok, mendayagunakan potensi dan sumber daya sosial dan ekonomi lokal, memperkuat budaya kewirausahaan, mengembangkan akses pasar dan menjalin kemitraan sosial ekonomi dengan berbagai pihak. Tujuan dari kegiatan ini adalah:
 - a) Untuk mewujudkan penilaian yang obyektif dan partisipatif untuk memungkinkan terjalannya pengalaman, prestasi dalam pengelolaan KUBE FM, serta pendamping berprestasi.
 - b) Muwujudkan media tukar pengalaman antar pengurus KUBE, serta pendamping secara kondusif yang dapat menggambarkan perkembangan dan dinamika KUBE serta pendamping.
 - c) Muwujudkan kompetisi sehat, spontan dan menjunjung nilai –nilai kebersamaan dalam berprestasi.

- d) Terjalannya KUBE dan Pendamping KUBE Berprestasi Tk. Provinsi Sumatera Barat untuk diikutsertakan pada seleksi tingkat Nasional tahun 2019.
- e) Meningkatnya kesejahteraan masyarakat fakir miskin yang menjadi anggota kelompok KUBE.
- e. Bantuan Pengembangan E-Warong KUBE Jasa Perkotaan dan UMKM;
Bantuan pengembangan E-Warong KUBE Jasa Perkotaan dan UMKM dilaksanakan untuk meningkatkan pengetahuan fakir miskin tentang elektronik warung gotong royong (E-Warong). Fasilitas ini untuk memenuhi kebutuhan pangan Keluarga Penerima Manfaat. Pada tahun ini sasaran kegiatan berjumlah 8 kelompok
- f. Penumbuhan/Pengembangan Usaha Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) FM;

Kegiatan ini dilaksanakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Fakir Miskin. Fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan atau orang yang mempunyai mata pencaharian tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan.

KUBE FM adalah himpunan dari keluarga yang tergolong fakir miskin yang dibentuk, tumbuh dan berkembang atas dasar prakarsanya sendiri, saling berinteraksi satu sama lain dan tinggal dalam satu wilayah tertentu dengan tujuan meningkatkan produktivitas anggotanya. Bantuan ini diberikan kepada 7 kelompok di Kota Solok, 140 kelompok di Kabupaten Pasaman, dan 20 kelompok di Kabupaten Pasaman.

- g. Rapat Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/ Rastra
Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau rastra adalah program bantuan pangan untuk masyarakat miskin dengan nilai bantuan Rp110.000 per bulan. Penyaluran bantuan kepada penerima yang berdasarkan basis data

terpadu (BDT) melalui Himpunan Bank Negara (Himbara). Rapat monitoring ini diikuti oleh 50 orang peserta.

- h. Bantuan Penumbuhan Usaha melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) FM Pedesaan;

Kegiatan ini dilaksanakan agar KUBE yang diberikan bantuan stimulan dapat meningkatkan kesejahteraan anggota KUBE. Sasaran sejumlah 730 kk/ 73 kelompok usaha bersama yang berlokasi di Kab. Padang Pariaman, Kab. Agam, Kab. Pasaman, Kab. Sijunjung, Kab. Dharmasraya, dan Kab. Tanah Datar.

- i. Bimbingan Pemantapan Pendamping KUBE PFM Pedesaan;
Kegiatan ini diikuti oleh 50 orang Pendamping KUBE Pedesaan.
- j. Rapat Evaluasi Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi BDT Kab/Kota Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau rastra diberikan kepada masyarakat miskin sesuai Basis Data Terpadu (BDT). Agar tepat sasaran dan menjamin kebenaran data maka dilakukan verifikasi dan validasi data kemiskinan yang ada di kabupaten/ kota. Rapat evaluasi ini diikuti oleh 57 orang peserta.

p) Program Pencegahan, Penanganan dan Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkoba

Adapun kegiatan pada program ini sebagai berikut:

- a. Bimbingan dan Pelatihan Keterampilan dan Bimbingan Sosial Korban NAPZA/HIV

Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kepercayaan diri bagi korban HIV dalam menjalankan fungsi sosialnya di masyarakat. Kegiatan yang dilakukan adalah pelatihan keterampilan menyulam dan membuat *handycraft* dari barang-barang bekas tak terpakai untuk melatih korban HIV supaya dapat mengisi waktu dengan kegiatan yang positif dan produktif. Bimbingan ini diikuti oleh 20 orang peserta.

- b. Penyuluhan Penanggulangan Narkoba dan Bimtek Penanganan HIV bagi PSKS

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman PSKS tentang penanggulangan Narkoba serta memberikan pengetahuan terhadap pelajar

tentang bahaya narkoba dan penyakit HIV. Sasaran kegiatan ini sebanyak 150 orang penyuluh narkoba dan 57 orang bimtek HIV.

c. Rapat Koordinasi Penguatan Lembaga RBM tentang Korban Penyalahgunaan NAPZA

Rapat ini bertujuan meningkatkan pengetahuan peserta tentang Pelaksanaan Rehabilitasi Berbasis Masyarakat dan Lembaga Kesejahteraan Sosial bagi Korban Penyalahgunaan NAPZA yang diikuti oleh 55 orang peserta.

Adapun realisasi pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat yang bersumber dari dana APBD tahun anggaran 2019 dapat dilihat pada Tabel A.2.1 halaman berikutnya.

Tabel A.1. Realisasi Program dan Kegiatan

| No. | URAIAN | Anggaran | Bobot | REALISASI | | |
|----------|---|-----------------------|---------------|---------------|-----------------------|--------------|
| | | Tahun ini | Fisik | Fisik | Keuangan | |
| | | (Rp) | % | % | (Rp) | % |
| | BELANJA LANGSUNG | 99.790.901.400 | 100,00 | 99,69 | 92.224.954.341 | 92,42 |
| | BELANJA LANGSUNG UMUM | 10.264.495.225 | 10,29 | 99,93 | 9.833.037.797 | 95,80 |
| 1 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 5.282.494.196 | 5,29 | 100,00 | 5.048.320.246 | 95,57 |
| 1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 109.055.140 | 0,11 | 100,00 | 108.978.940 | 99,93 |
| 2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik | 896.379.960 | 0,90 | 100,00 | 712.302.669 | 79,46 |
| 3 | Penyediaan Jasa Kebersihan, Pengaman dan Sopir Kantor | 2.366.336.600 | 2,37 | 100,00 | 2.347.851.949 | 99,22 |
| 4 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | 162.111.748 | 0,16 | 100,00 | 161.747.758 | 99,78 |
| 5 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | 95.746.600 | 0,10 | 100,00 | 95.723.150 | 99,98 |
| 6 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor | 149.488.070 | 0,15 | 100,00 | 149.138.218 | 99,77 |
| 7 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 338.038.200 | 0,34 | 100,00 | 332.027.190 | 98,22 |
| 8 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan | 58.216.000 | 0,06 | 100,00 | 57.416.000 | 98,63 |
| 9 | Penyediaan Bahan Logistik kantor | 335.894.884 | 0,34 | 100,00 | 324.648.140 | 96,65 |
| 10 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan keluar Daerah | 464.902.973 | 0,47 | 100,00 | 464.208.232 | 99,85 |
| 11 | Penyediaan Jasa Informasi, Dokumentasi dan Publikasi | 37.770.021 | 0,04 | 100,00 | 34.590.000 | 91,58 |
| 12 | Penyediaan Jasa Pembinaan | 97.422.000 | 0,10 | 100,00 | 91.402.000 | 93,82 |

| | | | | | | |
|----------|---|----------------------|-------------|---------------|----------------------|--------------|
| | Mental dan Fisik Aparatur | | | | | |
| 13 | Penyediaan Makanan dan Minuman | 171.132.000 | 0,17 | 100,00 | 168.286.000 | 98,34 |
| 2 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 3.381.311.384 | 3,39 | 99,82 | 3.258.821.141 | 96,38 |
| 1 | Pengadaan Meubelier | 216.000.000 | 0,22 | 100,00 | 215.350.455 | 99,70 |
| 2 | Pengadaan Komputer dan Jaringan Komputerisasi | 247.000.000 | 0,25 | 100,00 | 244.378.950 | 98,94 |
| 3 | Pemeliharaan rutin/berkala alat studio, alat Komunikasi dan Alat Informasi | 12.450.000 | 0,01 | 100,00 | 12.450.000 | 100,00 |
| 4 | Pemeliharaan rutin/ berkala Gedung Kantor | 419.040.000 | 0,42 | 100,00 | 417.274.320 | 99,58 |
| 5 | Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | 419.071.584 | 0,42 | 100,00 | 371.182.522 | 88,57 |
| 6 | Pemeliharaan rutin/berkala Komputer dan Jaringan Komputerisasi | 76.510.000 | 0,08 | 100,00 | 76.469.353 | 99,95 |
| 7 | Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor | 1.148.000.000 | 1,15 | 100,00 | 1.126.682.000 | 98,14 |
| 8 | Pemeliharaan Rutin/ Berkala Instalasi dan Jaringan | 76.913.000 | 0,08 | 100,00 | 74.340.540 | 96,66 |
| 9 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan | 22.550.000 | 0,02 | 73,39 | 15.221.087 | 67,50 |
| 10 | Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional | 275.000.000 | 0,28 | 100,00 | 245.068.250 | 89,12 |
| 11 | Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 349.460.800 | 0,35 | 100,00 | 344.715.664 | 98,64 |
| 12 | Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan/Perlengkapan Gedung Kantor | 52.796.000 | 0,05 | 100,00 | 49.168.000 | 93,13 |
| 13 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Monumen dan Bangunan Sejarah | 66.520.000 | 0,07 | 100,00 | 66.520.000 | 100,00 |
| 3 | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | 151.200.000 | 0,15 | 100,00 | 122.018.900 | 80,70 |
| 1 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya | 151.200.000 | 0,15 | 100,00 | 122.018.900 | 80,70 |
| 4 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 57.266.000 | 0,06 | 100,00 | 54.359.100 | 94,92 |
| 1 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan | 57.266.000 | 0,06 | 100,00 | 54.359.100 | 94,92 |
| 5 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 1.392.223.645 | 1,40 | 99,95 | 1.349.518.410 | 96,93 |
| 1 | Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD | 318.265.395 | 0,32 | 100,00 | 314.632.920 | 98,86 |
| 2 | Penatausahaan Keuangan SKPD | 583.290.250 | 0,58 | 100,00 | 575.898.650 | 98,73 |
| 3 | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 38.051.400 | 0,04 | 100,00 | 38.051.400 | 100,00 |

| | | | | | | |
|----------|--|-----------------------|--------------|---------------|-----------------------|--------------|
| 4 | Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan SKPD | 132.989.050 | 0,13 | 100,00 | 132.476.202 | 99,61 |
| 5 | Penyusunan Sinergitas Program antar Kab/Kota | 111.629.750 | 0,11 | 100,00 | 111.541.750 | 99,92 |
| 6 | Pengelolaan, Pengawasan dan pengendalian Aset SKPD | 207.997.800 | 0,21 | 99,66 | 176.917.488 | 85,06 |
| | BELANJA LANGSUNG WAJIB | 89.526.406.175 | 89,71 | 99,66 | 82.391.916.544 | 92,03 |
| 6 | Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial | 293.159.750 | 0,29 | 99,85 | 235.279.450 | 80,26 |
| 1 | Bimbingan Teknis Satuan Bhakti Pekerja Sosial | 68.120.600 | 0,07 | 100,00 | 64.368.600 | 94,49 |
| 2 | Sosialisasi Kegiatan Unit Institusi Layanan Sosial (ULS) | 27.063.150 | 0,03 | 100,00 | 25.783.150 | 95,27 |
| 3 | Rujukan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial | 128.303.500 | 0,13 | 99,66 | 76.365.200 | 59,52 |
| 4 | Sosialisasi Program Penanganan Anak Bermasalah dengan Hukum (ABH) | 69.672.500 | 0,07 | 100,00 | 68.762.500 | 98,69 |
| 7 | Program Pembinaan Anak Terlantar | 6.907.798.435 | 6,92 | 99,99 | 6.808.100.117 | 98,56 |
| 1 | Biaya Pendidikan Klien Tri Murni) | 315.486.300 | 0,32 | 100,00 | 284.095.000 | 90,05 |
| 2 | Tim PIPA (Pertimbangan Izin Pengangkatan Anak) | 50.931.100 | 0,05 | 100,00 | 44.894.100 | 88,15 |
| 3 | Pengadaan Kelengkapan Klien | 924.063.625 | 0,93 | 100,00 | 906.461.500 | 98,10 |
| 4 | Penyediaan Obat-obatan dan Dokter Pakai Habis | 26.452.000 | 0,03 | 100,00 | 26.452.000 | 100,00 |
| 5 | Pelatihan Keterampilan dan Praktek Belajar bagi Anak Terlantar (PSAABR Budi Utama Lubuk Alung) | 549.634.652 | 0,55 | 100,00 | 546.851.600 | 99,49 |
| 6 | Seleksi Penerimaan Calon Kelayan | 45.530.000 | 0,05 | 100,00 | 42.817.415 | 94,04 |
| 7 | Penyediaan Bahan Pendidikan (PSAABR Budi Utama Lubuk Alung) | 205.360.000 | 0,21 | 100,00 | 205.360.000 | 100,00 |
| 8 | Pendidikan dan Pelatihan bagi Penghuni Panti (Budi Utama) | 250.850.000 | 0,25 | 100,00 | 250.150.000 | 99,72 |
| 9 | Rapat Koordinas Pelayanan Rehabilitasi Kesos Anak | 160.536.500 | 0,16 | 100,00 | 156.474.500 | |
| 10 | Pengadaan Makanan dan Minuman | 3.125.711.688 | 3,13 | 100,00 | 3.124.986.368 | 99,98 |
| 11 | Pelatihan Keterampilan dan Praktek Belajar bagi Anak Terlantar (PSBR Harapan) | 755.780.020 | 0,76 | 100,00 | 723.897.084 | 95,78 |
| 12 | Sehari Bersama Anak | 40.441.500 | 0,04 | 100,00 | 40.441.500 | 100,00 |
| 13 | Pendidikan dan Pelatihan bagi Penghuni Panti (Trimurni) | 457.021.050 | 0,46 | 100,00 | 455.219.050 | 99,61 |
| 8 | Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Eks Trauma | 3.267.522.575 | 3,27 | 100,00 | 3.206.132.993 | 98,12 |
| 1 | Penyediaan Bahan Obat- | 21.601.800 | 0,02 | 100,00 | 21.576.500 | 99,88 |

| | | | | | | |
|-----------|--|-----------------------|--------------|---------------|----------------------|--------------|
| | obatan dan Dokter Pakai Habis | | | | | |
| 2 | Rehabilitasi Sosial terhadap Penyandang Disabilitas melalui Loka Bina Kaya (LBK) | 113.422.850 | 0,11 | 100,00 | 112.380.350 | 99,08 |
| 3 | Biaya Kelengkapan Klien | 272.755.479 | 0,27 | 100,00 | 271.760.000 | 99,64 |
| 4 | Pemberian Penghargaan Bagi Tokoh yang peduli pada Penyandang Disabilitas | 83.103.000 | 0,08 | 100,00 | 76.572.900 | 92,14 |
| 5 | Pendayagunaan Para Penyandang Disabilitas | 733.732.779 | 0,74 | 100,00 | 698.145.300 | 95,15 |
| 6 | Pendidikan dan Pelatihan bagi Penyandang Disabilitas | 445.528.267 | 0,45 | 100,00 | 440.965.000 | 98,98 |
| 7 | Penguatan Motivasi Penyandang Disabilitas | 22.130.130 | 0,02 | 100,00 | 22.130.100 | 100,00 |
| 8 | Bimbingan Sosial bagi PSM/TKSK | 132.559.500 | 0,13 | 100,00 | 121.357.873 | 91,55 |
| 9 | Pengadaan Makanan dan Minuman | 1.442.688.770 | 1,45 | 100,00 | 1.441.244.970 | 99,90 |
| 9 | Program Pembinaan Panti Lanjut Usia Terlantar | 2.760.876.034 | 2,77 | 100,00 | 2.746.948.462 | 99,50 |
| 1 | Penyediaan Bahan Obat-obatan dan Alat-alat Dokter Pakai Habis | 67.973.900 | 0,07 | 100,00 | 67.973.900 | 100,00 |
| 2 | Biaya Jasa Penguburan / Pemulangan Klien | 37.000.000 | 0,04 | 100,00 | 37.000.000 | 100,00 |
| 3 | Lanjut Usia Berkreasi | 40.194.600 | 0,04 | 100,00 | 40.194.600 | 100,00 |
| 4 | Pendidikan dan Pelatihan bagi penghuni Panti Jompo | 647.933.476 | 0,65 | 100,00 | 637.670.484 | 98,42 |
| 5 | Biaya Kelengkapan Klien Panti Jompo | 395.190.420 | 0,40 | 100,00 | 393.623.600 | 99,60 |
| 6 | Biaya Makanan dan Minuman Klien di Panti Jompo | 1.572.583.638 | 1,58 | 100,00 | 1.570.485.878 | 99,87 |
| 10 | Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial lainnya) | 904.957.700 | 0,91 | 99,76 | 903.682.156 | 99,86 |
| 1 | Pengadaan Kelengkapan Klien | 118.600.000 | 0,12 | 100,00 | 118.600.000 | 100,00 |
| 2 | Biaya Obat-obatan dan Dokter Pakai Habis | 22.492.000 | 0,02 | 100,00 | 22.492.000 | 100,00 |
| 3 | Pengadaan Makanan dan Minuman | 409.364.200 | 0,41 | 99,76 | 408.168.656 | 99,71 |
| 4 | Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Berusaha bagi eks Penyandang Penyakit Sosial | 354.501.500 | 0,36 | 100,00 | 354.421.500 | 99,98 |
| 11 | Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial | 10.815.873.972 | 10,84 | 97,35 | 9.307.887.224 | 86,06 |
| 1 | Bimbingan Kapasitas bagi Pengurus Karang Taruna se-Sumatera Barat | 5.980.745.000 | 5,99 | 99,84 | 5.422.089.600 | 90,66 |
| 2 | Penilaian PSKS (Karang Taruna, Orsos, PSM, TKSK) | 87.181.000 | 0,09 | 100,00 | 86.224.000 | 98,90 |

| | | | | | | |
|-----------|---|-----------------------|--------------|--------------|-----------------------|--------------|
| | Berprestasi Tingkat Sumatera Barat | | | | | |
| 3 | Pertemuan Forum Komunikasi Pekerja Sosial Masyarakat | 50.798.000 | 0,05 | 100,00 | 50.798.000 | 100,00 |
| 4 | Bimbingan Kapasitas bagi TKSK se-Sumbar | 97.956.000 | 0,10 | 82,69 | 80.996.000 | 82,69 |
| 5 | KSN Expo dan Award dalam HKS | 22.106.000 | 0,02 | 71,08 | 10.183.500 | 46,07 |
| 6 | Pelatihan Lanjutan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) se-Sumbar | 369.973.250 | 0,37 | 100,00 | 349.680.150 | 94,51 |
| 7 | Penguatan Nilai-nilai KSN | 133.730.200 | 0,13 | 100,00 | 133.730.200 | 100,00 |
| 8 | Bimbingan Jejaring Kerja LKS/ Orsos se-Sumatera Barat dalam rangka Akreditasi | 93.930.500 | 0,09 | 88,05 | 79.988.300 | 85,16 |
| 9 | Penguatan Peran LKS Posdaya dalam Penanggulangan Kemiskinan dan Penyelenggaraan Kesos | 389.425.000 | 0,39 | 98,77 | 265.781.000 | 68,25 |
| 10 | Penguatan Kelembagaan Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKKS) Provinsi dan Kab/Kota se-Sumatera Barat | 577.328.926 | 0,58 | 100,00 | 486.315.200 | 84,24 |
| 11 | Penyuluhan Kesejahteraan Sosial | 1.076.376.096 | 1,08 | 97,62 | 769.449.324 | 71,49 |
| 12 | Forum Komunikasi Pengurus Karang Taruna se-Sumbar | 54.550.000 | 0,05 | 100,00 | 54.550.000 | 100,00 |
| 13 | Pelatihan Dasar Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) se-Sumbar | 1.463.324.000 | 1,47 | 100,00 | 1.129.293.950 | 77,17 |
| 14 | Penguatan Peran Pilar dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial | 361.578.000 | 0,36 | 100,00 | 340.976.000 | 94,30 |
| 15 | Bimbingan Pengurus Organisasi se-Sumatera Barat | 56.872.000 | 0,06 | 84,91 | 47.832.000 | 84,10 |
| 12 | Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya | 54.095.239.520 | 54,21 | 99,98 | 49.262.754.163 | 91,07 |
| 1 | Penetapan calon lokasi Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) | 113.314.000 | 0,11 | 100,00 | 110.126.300 | 97,19 |
| 2 | Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) | 55.660.905 | 0,06 | 100,00 | 55.360.900 | 99,46 |
| 3 | Pengkajian Gelar Calon Pahlawan Nasional | 105.283.000 | 0,11 | 100,00 | 95.547.200 | 90,75 |
| 4 | Pelayanan Orang Terlantar | 20.618.500 | 0,02 | 99,31 | 20.475.500 | 99,31 |
| 5 | Sumbar Expo (Publikasi) | 227.196.000 | 0,23 | 100,00 | 216.904.609 | 95,47 |
| 6 | Bimbingan Pemantapan Pengurus LK 3 | 98.763.000 | 0,10 | 100,00 | 93.963.846 | 95,14 |
| 7 | Bimbingan dan Pelatihan Keterampilan Berusaha bagi | 52.322.000 | 0,05 | 100,00 | 52.322.000 | 100,00 |

| | | | | | | |
|-----------|---|----------------------|-------------|---------------|----------------------|--------------|
| | Komunitas Adat Terpencil (KAT) | | | | | |
| 8 | Bimbingan Teknis Pemantapan Petugas Pendata PMKS | 156.468.835 | 0,16 | 95,91 | 143.068.500 | 91,44 |
| 9 | Sosialisasi Undian Berhadian Gratis (UGB) | 53.545.000 | 0,05 | 100,00 | 46.605.000 | 87,04 |
| 10 | Bimbingan Keterampilan Berusaha bagi Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) | 53.178.715.840 | 53,29 | 99,99 | 48.395.117.908 | 91,00 |
| 11 | Pembuatan Buku Data PMKS dan PSKS | 33.352.440 | 0,03 | 100,00 | 33.262.400 | 99,73 |
| 13 | Program Penanganan Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial | 801.444.180 | 0,80 | 100,00 | 777.432.980 | 97,00 |
| 1 | Bantuan Logistik Bencana | 100.917.000 | 0,10 | 100,00 | 100.199.000 | 99,29 |
| 2 | Rakor Bencana Bencana Sosial | 83.593.000 | 0,08 | 100,00 | 81.893.000 | 97,97 |
| 3 | Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Logistik Bencana Sosial | 66.363.400 | 0,07 | 100,00 | 66.363.400 | 100,00 |
| 4 | Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Logistik Bencana Alam | 82.829.200 | 0,08 | 100,00 | 81.843.250 | 98,81 |
| 5 | Rakor Koordinasi Program Keluarga Harapan | 60.535.980 | 0,06 | 100,00 | 60.532.980 | 100,00 |
| 6 | Pemantapan Tim TRC Bencana Alam | 85.041.200 | 0,09 | 100,00 | 85.040.950 | 100,00 |
| 7 | Pemantapan Tim Psikososial Bencana Alam | 78.291.400 | 0,08 | 100,00 | 78.287.400 | 99,99 |
| 8 | Sinergitas Program Keluarga Harapan (PKH) | 122.101.500 | 0,12 | 100,00 | 111.701.500 | 91,48 |
| 9 | Peningkatan Capacity Building Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) | 121.771.500 | 0,12 | 100,00 | 111.571.500 | 91,62 |
| 14 | Program Pemberdayaan Fakir Miskin | 9.392.123.209 | 9,41 | 99,95 | 8.858.969.394 | 94,32 |
| 1 | Bimbingan Teknis Petugas Verifikasi dan Validasi BDT | 114.246.000 | 0,11 | 90,04 | 98.552.800 | 86,26 |
| 2 | Pengadaan Beras untuk Panti Swasta | 2.443.441.300 | 2,45 | 100,00 | 2.443.176.300 | 99,99 |
| 3 | Bimbingan Pemantapan Pendamping Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) | 119.553.309 | 0,12 | 94,43 | 93.972.500 | 78,60 |
| 4 | Seleksi dan Penghargaan KUBE dan Pendamping KUBE Berprestasi | 233.312.700 | 0,23 | 100,00 | 179.253.100 | 76,83 |
| 5 | Bantuan Pengembangan E-Warung KUBE Jasa Perkotaan dan UMKM | 3.856.098.900 | 3,86 | 99,94 | 3.731.915.200 | 96,78 |
| 6 | Penumbuhan/Pengembangan Usaha melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Pesisir dan Kepulauan | 328.346.200 | 0,33 | 100,00 | 297.238.550 | 90,53 |
| 7 | Rapat Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Non Tunai dan | 195.735.300 | 0,20 | 100,00 | 143.279.900 | 73,20 |

| | | | | | | |
|-----------|---|-----------------------|---------------|---------------|-----------------------|--------------|
| | RASTRA tahun 2019 | | | | | |
| 8 | Bantaun Penumbuhan Usaha Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) FM Pedesaan | 1.908.675.500 | 1,91 | 100,00 | 1.698.453.044 | 88,99 |
| 9 | Bimbingan Pemantapan Pendamping KUBE PFM Pedesaan | 86.879.900 | 0,09 | 100,00 | 81.934.600 | 94,31 |
| 10 | Rapat Evaluasi Pelaksanaan Verifikasi BDT Kab/Kota | 105.834.100 | 0,11 | 100,00 | 91.193.400 | 86,17 |
| 15 | Program Pencegahan, Penanganan dan Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkoba | 287.410.800 | 0,29 | 100,00 | 284.729.605 | 99,07 |
| 1 | Bimbingan dan Pelatihan Keterampilan dan Bimbingan Sosial Korban NAPZA/HIV | 77.454.000 | 0,08 | 100,00 | 77.454.000 | 100,00 |
| 2 | Penyuluhan Penanggulangan Narkoba dan Bimtek Penangan HIV bagi PSKS | 150.757.300 | 0,15 | 100,00 | 149.557.300 | 99,20 |
| 3 | Rapat Koordinasi Penguatan Lembaga RBM tentang Korban Penyalahgunaan Napza | 59.199.500 | 0,06 | 100,00 | 57.718.305 | 97,50 |
| | JUMLAH BELANJA LANGSUNG | 99.790.901.400 | 100,00 | 99,69 | 92.224.954.341 | 92,42 |

B. Outcome Program

Tabel A.2. Output dan Outcome

| No. | URAIAN | Outcome | Output | | |
|----------|---|--|---|-------------|---------------|
| | | | Kualitatif | Kuantitatif | |
| | | | | Target | Fisik % |
| I | BELANJA LANGSUNG | | | | 99,69 |
| I | BELANJA LANGSUNG UMUM | | | | 99,93 |
| 1 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | | | | 100,00 |
| 1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran Dinas Sosial dan 8 UPTD. | Terlaksananya penyediaan jasa surat menyurat di Dinas Sosial dan 8 UPTD. | 1 tahun | 100,00 |
| 2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik | Terpenuhinya kebutuhan air bersih, listrik dan komunikasi dalam rangka meningkatkan pelayanan administrasi | Terlaksananya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik di Dinas Sosial dan 8 UPTD. | 1 tahun | 100,00 |

| | | | | | |
|----|---|--|--|---------|--------|
| | | perkantoran di Dinas Sosial dan 8 UPTD. | | | |
| 3 | Penyediaan Jasa Kebersihan, Pengaman dan Sopir Kantor | Terpeliharanya kebersihan kantor Dinas dan 8 UPTD | Terlaksananya Jasa Kebersihan, Pengaman dan Sopir Kantor di Dinas Sosial dan 8 UPTD | 1 tahun | 100,00 |
| 4 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Terpenuhinya administrasi perkantoran Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat dan 8 UPTD. | Tersedianya alat tulis kantor di Dinas Sosial dan 8 UPTD. | 1 tahun | 100,00 |
| 5 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Terpenuhinya administrasi perkantoran Dinas Sosial dan UPTD. | Terlaksananya barang cetakan dan penggandaan di Dinas Sosial dan 8 UPTD. | | 100,00 |
| 6 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor | Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor. | Terlaksananya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Dinas Sosial dan 8 UPTD. | 1 tahun | 100,00 |
| 7 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Terpenuhinya kebutuhan peralatan rumah tangga kantor Dinas dan 8 UPTD | Terlaksananya peralatan rumah tangga kantor di Dinas Sosial dan 8 UPTD | 1 tahun | 100,00 |
| 8 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan | Meningkatnya pengetahuan umum aparatur di Dinas Sosial dan 8 UPTD. | Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan di Dinas Sosial dan 8 UPTD. | 1 tahun | 100,00 |
| 9 | Penyediaan Bahan Logistik kantor | Terpenuhinya bahan logistik kantor di Dinas dan 8 UPTD | Tersedianya bahan logistik kantor di Dinas Sosial dan 8 UPTD | 1 tahun | 100,00 |
| 10 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan keluar Daerah | Terjalannya koordinasi pelaksanaan tupoksi dan pelayanan Dinas Sosial dengan baik | Terlaksananya rapat koordinasi Dinas Sosial dengan instansi terkait dan vertikal secara baik | 1 tahun | 100,00 |
| 11 | Penyediaan Jasa Informasi, Dokumentasi dan Publikasi | Terinformasikan dan terpublikasikannya kegiatan pembangunan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial dan UPTD kepada masyarakat luas | Terlaksananya Jasa Informasi, Publikasi, dan Dinas Sosial dan 8 UPTD | 1 tahun | 100,00 |
| 12 | Penyediaan Jasa Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur | Terpenuhinya kesehatan, mental, spiritual aparat Dinas Sosial dan 8 UPTD | Terlaksananya kesehatan, mental, spiritual aparat Dinas Sosial dan 8 UPTD | 1 tahun | 100,00 |

| | | | | | |
|----------|--|--|--|--|--------------|
| 13 | Penyediaan Makanan dan Minuman | Terpenuhinya makan minum rapat dan tamu dalam rangka rapat koordinasi | Terlaksananya makan minum rapat dan tamu dalam rangka rapat koordinasi. | 1 tahun | 100,00 |
| 2 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | | | | 99,82 |
| 1 | Pengadaan Meubelier | Terpenuhinya meubeler kantor di Dinas Sosial dan 8 UPTD | Terlaksananya penyediaan meubeler di Dinas Sosial dan 8 UPTD | 91 unit | 100,00 |
| 2 | Pengadaan Komputer dan Jaringan Komputerisasi | Terpenuhinya komputer dan jaringan komputerisasi untuk kelancaran pelaksanaan tugas di Dinas Sosial dan 8 UPTD | Terlaksananya pengadaan komputer dan jaringan komputerisasi di Dinas Sosial dan 8 UPTD | 35 unit | 100,00 |
| 3 | Pemeliharaan rutin/berkala alat studio, alat Komunikasi dan Alat Informasi | Terpenuhinya alat studio, alat komunikasi dan alat informasi di Dinas Sosial dan 8 UPTD dalam keadaan baik. | Terlaksananya pemeliharaan alat studio, alat komunikasi dan alat informasi di Dinas Sosial dan 8 UPTD. | 30 unit | 100,00 |
| 4 | Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor | Terpenuhinya gedung kantor di Dinas Sosial dan 8 UPTD dalam kondisi baik. | Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor di Dinas Sosial dan 8 UPTD | 2 gedung, 3 pembatas shaf mushala, penggantian instalasi dan jaringan listrik, dan pembuatan sumur bor | 100,00 |
| 5 | Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Terpenuhinya ketersediaan kendaraan dinas/operasional di Dinas Sosial dan 8 UPTD dalam kondisi baik. | Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional di Dinas Sosial dan 8 UPTD. | 37 unit | 100,00 |
| 6 | Pemeliharaan rutin/berkala Komputer dan Jaringan Komputerisasi | Terpenuhinya ketersediaan komputer & jaringan komputerisasi di Dinas Sosial dan 8 UPTD dalam keadaan baik. | Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala komputer & jaringan komputerisasi di Dinas Sosial dan 8 UPTD. | 145 unit | 100,00 |
| 7 | Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor | Terpenuhinya ketersediaan gedung kantor dalam keadaan baik dan | Terlaksananya rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor | 7 unit | 100,00 |

| | | | | | |
|----------|---|--|--|---------------------|---------------|
| | | kondusif. | | | |
| 8 | Pemeliharaan Rutin/ Berkala Instalasi dan Jaringan | Terpenuhinya instalasi listrik, telepon, dan air dalam kondisi baik di Dinas Sosial dan 8 UPTD | Terlaksananya pemeliharaan instalasi listrik, telepon dan air di Dinas Sosial dan 8 UPTD | 12 bulan | 100,00 |
| 9 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan | Terpenuhinya ketersediaan kendaraan Dinas Operasional Pejabat Eselon II di Dinas Sosial dalam keadaan baik. | Terlaksananya pemeliharaan kendaraan Dinas Operasional Pejabat Eselon II di Dinas Sosial | 1 unit | 73,39 |
| 10 | Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional | Terpenuhinya ketersediaan kendaraan dinas/operasional di Dinas Sosial dan 8 UPTD sesuai kebutuhan. | Terlaksananya pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional di Dinas Sosial dan 8 UPTD sesuai kebutuhan. | 5 unit sepeda motor | 100,00 |
| 11 | Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Terpenuhinya Peralatan dan Perlengkapan Kantor di Dinas Sosial dan 8 UPTD sesuai kebutuhan. | Terlaksananya penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor di Dinas Sosial dan 8 UPTD | 161 unit | 100,00 |
| 12 | Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan/Perlengkapan Gedung Kantor | Terpenuhinya Peralatan/Perlengkapan Gedung Kantor di Dinas Sosial dan 8 UPTD dalam kondisi baik. | Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala Peralatan/Perlengkapan Gedung Kantor di Dinas Sosial dan 8 UPTD | 187 unit | 100,00 |
| 13 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Monumen dan Bangunan Sejarah | Terpenuhinya kondisi taman makam pahlawan yang baik | Terlaksananya pemeliharaan taman makam pahlawan Sumatera Barat | 1 unit | 100,00 |
| 3 | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | | | | 100,00 |
| 1 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya | Terpenuhinya pakaian dinas pegawai dan PTT Dinas Sosial sesuai ketentuan. | Terlaksananya pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya | 280 stel | 100,00 |
| 4 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | | | 100,00 |
| 1 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan | Meningkatnya pengetahuan teknis implementasi peraturan perundang-undangan pegawai dinas sosial dan UPTD perundang- | Dapat diikutsertakan para pegawai pada bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan | 7 orang | 100,00 |

| | | | | | |
|-----------|---|--|--|--|--------------|
| | | undangan | | | |
| 5 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | | | | 99,95 |
| 1 | Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD | Terpenuhinya rencana program dan kegiatan dinas sosial | Terlaksananya penyusunan rencana kerja dan anggaran kegiatan dinas sosial | 6 dokumen | 100,00 |
| 2 | Penatausahaan Keuangan SKPD | Meningkatnya kinerja pengelola keuangan Dinas Sosial dan UPTD | Terlaksananya penyediaan honorarium pengelola keuangan Dinas Sosial dan UPTD | 12 bulan | 100,00 |
| 3 | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Terpenuhinya laporan capaian kinerja Dinas Sosial | Telaksananya penyusunan laporan capaian kinerja dinas sosial | 6 dokumen | 100,00 |
| 4 | Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan SKPD | Terpantau dan terawasinya pelaksanaan program dan kegiatan SKPD | Terlaksananya monitoring dan evaluasi program dan kegiatan SKPD | 8 UPTD dan Panti Sosial di 19 Kab/Kota | 100,00 |
| 5 | Penyusunan Sinergitas Program antar Kab/Kota | Adanya sinergisitas program dan kegiatan Dinas Sosial Provinsi dengan kab/Kota | Terlaksananya Sinergisitas Program antar Kab/Kota | 85 orang | 100,00 |
| 6 | Pengelolaan, Pengawasan dan pengendalian Aset SKPD | Meningkatnya kinerja pengelola aset Dinas Sosial dan UPTD | Terlaksananya penyediaan honorarium pengelola aset Dinas Sosial dan UPTD | 12 bulan | 99,66 |
| II | BELANJA LANGSUNG WAJIB | | | | 99,66 |
| 6 | Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial | | | | 99,85 |
| 1 | Bimbingan Teknis Satuan Bhakti Pekerja Sosial | Meningkatnya kapasitas dan kinerja Satuan Bhakti Pekerja Sosial dalam melaksanakan pelayanan KSA | Terlaksananya Bimbingan Teknis Satuan Bhakti Pekerja Sosial dari Kab/Kota | 50 orang | 100,00 |
| 2 | Sosialisasi Kegiatan Unit Institusi Layanan Sosial (ULS) | Meningkatnya pemahaman petugas Dinas Sosial Kab/Kota dan Mitra Kerja terntang kegiatan ULS | Terlaksananya Sosialisasi Kegiatan Unit Institusi Layanan Sosial (ULS) kepada petugas Kab/Kota | 60 orang | 100,00 |

| | | | | | |
|----------|--|--|---|---|--------------|
| 3 | Rujukan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial | Terpenuhinya pelayanan dan rehabilitasi sosial terhadap klien penyandang disabilitas (ODK) dari Prov.Sumatera Barat ke Panti Rujukan Rehabilitas Sosial | Terlaksananya koordinasi dan pengiriman penyandang disabilitas untuk mengikuti rehabilitasi sosial di Panti Sosial Rujukan | 12 orang | 99,66 |
| 4 | Sosialisasi Program Penanganan Anak Bermasalah dengan Hukum (ABH) | Meningkatnya pemahaman petugas Dinas Sosial Kab/Kota dan Mitra Kerja terntang ABH | Terlaksananya Sosialisasi Program Penanganan Anak Bermasalah dengan Hukum (ABH) kepada petugas Kab/Kota | 50 orang | 100,00 |
| 7 | Program Pembinaan Anak Terlantar | | | | 99,99 |
| 1 | Biaya Pendidikan Klien Tri Murni) | Terpenuhinya pendidikan anak terlantar yang direhabilitasi di PSAA Tri Murni | Tersedianya biaya pendidikan anak terlantar yang direhabilitasi di PSAA Tri Murni | 100 orang (perempuan) | 100,00 |
| 2 | Tim PIPA (Pertimbangan Izin Pengangkatan Anak) | Terseleenggaranya persidangan untuk pengangkatan anak terlantar | Terlaksananya sidang Tim PIPA (Pertimbangan Izin Pengangkatan Anak) | 25 orang | 100,00 |
| 3 | Pengadaan Kelengkapan Klien | Terpenuhinya kelengkapan anak terlantar yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi melalui UPTD PSAABR Budi Utama Lubuk Alung dan PSBR Harapan Padang Panjang | Tersedianya kelengkapan anak terlantar yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi melalui UPTD PSAABR Budi Utama Lubuk Alung dan PSBR Harapan Padang Panjang | 355 orang (155 laki-laki dan 200 perempuan) | 100,00 |
| 4 | Penyediaan Obat-obatan dan Dokter Pakai Habis | Terpenuhinya pelayanan kesehatan bagi anak terlantar yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi di dalam panti | Terlaksananya Penyediaan Obat-obatan dan Jasa Dokter | 12 bulan | 100,00 |
| 5 | Pelatihan Keterampilan dan Praktek Belajar bagi Anak Terlantar (PSAABR Budi Utama Lubuk Alung) | Terpenuhinya pelayanan pendidikan bagi anak terlantar di PSABR Budi Utama Lubuk Alung | Terlaksananya pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi Anak Terlantar di PSAABR Budi Utama | 160 orang (laki-laki); jurusan otomotif, elektro, instalasi listrik, dan las listrik/karbit | 100,00 |
| 6 | Seleksi Penerimaan Calon Kelayan | Terpenuhi Seleksi Penerimaan Calon Kelayan yang akan | Terlaksananya Seleksi Penerimaan Calon Kelayan | 65 orang | 100,00 |

| | | | | | |
|----------|--|---|--|---|---------------|
| | | mengikuti rehabilitasi sesuai ketentuan | | | |
| 7 | Penyediaan Bahan Pendidikan (PSAABR Budi Utama Lubuk Alung) | Terpenuhinya bahan pendidikan kelayan PSAABR Budi Utama Lubuk Alung | Terlaksananya bahan Pendidikan Kelayan PSAABR Budi Utama Lubuk Alung | 75 orang | 100,00 |
| 8 | Pendidikan dan Pelatihan bagi Penghuni Panti (Budi Utama) | Terpenuhinya bahan pendidikan kelayan PSAABR Budi Utama Lubuk Alung | Terlaksananya bahan Pendidikan Kelayan PSAABR Budi Utama Lubuk Alung | 75 rang (laki-laki) | 100,00 |
| 9 | Rapat Koordinas Pelayanan Rehabilitasi Kesos Anak | Terjalinnnya koordinasi antar pengurus panti sosial swasta dengan petugas sosial kab/ kota tentang penanganan perlindungan anak | Terlaksananya rapat koordinasi tentang rehabilitasi sosial anak | 125 orang | 100,00 |
| 10 | Pengadaan Makanan dan Minuman | Terpenuhinya pelayanan permakanan dan perminuman bagi anak terlantar di PSBR Harapan, PSAA Tri Murni, dan PSAABR Budi Utama | Terlaksananya Pengadaan Makanan dan Minuman bagi anak terlantar di PSBR Harapan, PSAA Tri Murni, dan PSAABR Budi Utama | 355 orang (155 laki-laki dan 200 perempuan) | 100,00 |
| 11 | Pelatihan Keterampilan dan Praktek Belajar bagi Anak Terlantar (PSBR Harapan) | Terpenuhinya pelayanan pendidikan bagi anak terlantar di PSBR Harapan Padang Panjang | Terlaksananya pelatihan keterampilan Kelayan PSAABR Budi Utama Lubuk Alung | 200 orang (Perempuan) | 100,00 |
| 12 | Sehari Bersama Anak | Meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap anak terlantar | Terlaksananya penyelenggaraan sehari bersama anak | 200 orang | 100,00 |
| 13 | Pendidikan dan Pelatihan bagi Penghuni Panti (Trimurni) | Terpenuhinya pelayanan pendidikan bagi kelayan PSAA Tri Murni | Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan bagi Penghuni Panti (Tri Murni) | 100 orang (Perempuan) | 100,00 |
| 8 | Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Eks Trauma | | | | 100,00 |
| 1 | Penyediaan Bahan Obat-obatan dan Dokter Pakai Habis | Terpenuhinya kegiatan pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma | Terlaksananya pendidikan dan pelatihan bagi kelayan tuna netra di PSBN Tuah Sakato Padang | 12 bulan | 100,00 |
| 2 | Rehabilitasi Sosial terhadap Penyandang Disabilitas melalui Loka Bina Kaya (LBK) | Terpenuhinya kegiatan pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma | Terlaksana Rehabilitasi Sosial terhadap Penyandang Disabilitas melalui Loka Bina Kaya (LBK) | 15 orang | 100,00 |

| | | | | | |
|----------|--|--|---|--|---------------|
| 3 | Biaya Kelengkapan Klien | Terpenuhinya kebutuhan kelengkapan kelayan di PSBN Tuah Sakato Padang dan PSBGHI Padang | Terlaksananya pengadaan biaya kelengkapan kelayan | 150 orang (92 laki-laki, 58 perempuan) | 100,00 |
| 4 | Pemberian Penghargaan Bagi Tokoh yang peduli pada Penyandang Disabilitas | Meningkatnya kepedulian masyarakat kepada Penyandang Disabilitas | Terlaksananya Pemberian Penghargaan Bagi Tokoh yang peduli pada Penyandang Disabilitas | 54 orang | 100,00 |
| 5 | Pendayagunaan Para Penyandang Disabilitas | Meningkatnya keberfungsian sosial para Penyandang Disabilitas | Terlaksananya Pendayagunaan Para Penyandang Disabilitas | 100 orang | 100,00 |
| 6 | Pendidikan dan Pelatihan bagi Penyandang Disabilitas | Terpenuhinya kegiatan pendidikan dan pelatihan bagi kelayan tuna netra di PSBN Tuah Sakato Padang | Terlaksananya pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma | 50 orang | 100,00 |
| 7 | Penguatan Motivasi Penyandang Disabilitas | Meningkatnya keberfungsian sosial para Penyandang Disabilitas | Terlaksananya Penguatan Motivasi Penyandang Disabilitas | 1 kegiatan | 100,00 |
| 8 | Bimbingan Sosial bagi PSM/TKSK | Meningkatnya kapasitas dan motivasi PSM/TKSK | Terlaksananya Bimbingan Sosial bagi PSM/TKSK | 68 orang | 100,00 |
| 9 | Pengadaan Makanan dan Minuman | Terpenuhinya kebutuhan makan dan minum di PSBN Tuah Sakato Padang dan PSBGHI Padang | Terlaksananya biaya makan dan minum kelayan penyandang cacat dalam panti | 150 orang | 100,00 |
| 9 | Program Pembinaan Panti Lanjut Usia Terlantar | | | | 100,00 |
| 1 | Penyediaan Bahan Obat-obatan dan Alat-alat Dokter Pakai Habis | Terpenuhinya kebutuhan obat-obatan kelayan di PSTW Kasih Sayang Ibu Batu Sangkar dan PSTW Sabai Nan Aluih Sicincin | Terlaksananya pengadaan Obat-obatan kelayan di PSTW Kasih Sayang Ibu Batu Sangkar dan PSTW Sabai Nan Aluih Sicincin | 12 bulan | 100,00 |
| 2 | Biaya Jasa Penguburan / Pemulangan Klien | Terpenuhinya pemakaman dan pemulangan kelayan kepada keluarganya | Terlaksananya jasa pemakaman dan pemulangan kelayan | 12 bulan | 100,00 |
| 3 | Lanjut Usia Berkreasi | Meningkatnya kepedulian masyarakat luas terhadap lanjut usia | Terlaksananya kegiatan lanjut usia berkreasi | 250 orang | 100,00 |
| 4 | Pendidikan dan Pelatihan bagi penghuni Panti Jompo | Meningkatnya kemandirian lanjut usia di PSTW Sabai nan aluih sicincin dan PSTW Kasih Sayang Cubadak | Terlaksananya pendidikan dan pelatihan bagi penghuni Panti Jompo | 180 orang | 100,00 |

| | | | | | |
|-----------|--|--|--|-------------|--------------|
| 5 | Biaya Kelengkapan Klien Panti Jompo | Terpenuhinya kelengkapan kelayan di PSTW Sabai Nan Aluih Sicincin dan PSTW Kasih Sayang Ibu | Terlaksananya pengadaan bahan kelengkapan kelayan lanjut usia di PSTW Sabai Nan Aluih Sicincin dan PSTW Kasih Sayang Ibu | 180 orang | 100,00 |
| 6 | Biaya Makanan dan Minuman Klien di Panti Jompo | Terpenuhinya Kebutuhan Makan kelayan PSTW Kasih Sayang Ibu Batusangkar dan PSTW Sabai Nan Aluih | Terlaksananya pengadaan makan dan minum kelayan jompo di PSTW Kasih Sayang Ibu Batusangkar dan PSTW Sabai Nan Aluih Sicincin | 180 orang | 100,00 |
| 10 | Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial lainnya) | | | | 99,76 |
| 1 | Pengadaan Kelengkapan Klien | Terpenuhinya kelengkapan eks tuna susila PSKW Andam Dewi Solok | Terlaksananya pengadaan kelengkapan klien | 40 orang | 100,00 |
| 2 | Biaya Obat-obatan dan Dokter Pakai Habis | Terpenuhinya obat-obatan kelayan eks tuna susila PSKW Andam Dewi Solok | Terlaksananya pengadaan obat-obatan | 12 bulan | 100,00 |
| 3 | Pengadaan Makanan dan Minuman | Terpenuhinya kebutuhan pangan klien eks tuna susila pada PSKW Andam Dewi Solok | Terlaksananya pengadaan makan dan minuman bagi eks tuna susila | 40 orang | 99,76 |
| 4 | Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Berusaha bagi eks Penyandang Penyakit Sosial | Meningkatnya keterampilan berusaha bagi kelayan eks penyandang penyakit sosial | Terlaksananya pendidikan dan pelatihan keterampilan berusaha eks penyandang penyakit sosial | 40 orang | 100,00 |
| 11 | Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial | | | | 97,35 |
| 1 | Bimbingan Kapasitas bagi Pengurus Karang Taruna se-Sumatera Barat | Meningkatnya kapasitas Pengurus Karang Taruna se-Sumatera Barat | Terlaksananya Bimbingan Kapasitas bagi Pengurus Karang Taruna se-Sumatera Barat | 1.811 orang | 99,84 |
| 2 | Penilaian PSKS (Karang Taruna, Orsos, PSM, TKSK) Berprestasi Tingkat Sumatera Barat | Termotivasinya para Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) untuk meningkatkan pelayanan kesejahteraan sosial kepada masyarakat | Terlaksananya penilaian Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) berprestasi tingkat Sumatera Barat | 32 orang | 100,00 |

| | | | | | |
|----|--|---|--|-------------|--------|
| 3 | Pertemuan Forum Komunikasi Pekerja Sosial Masyarakat | Termotivasinya Pekerja Sosial Masyarakat untuk meningkatkan pelayanan kesejahteraan sosial kepada masyarakat | Terlaksananya Pertemuan Forum Komunikasi Pekerja Sosial Masyarakat | 50 orang | 100,00 |
| 4 | Bimbingan Kapasitas bagi TKSK se-Sumbar | Meningkatnya kapasitas TKSK se-Sumatera Barat | Terlaksananya Bimbingan Kapasitas bagi TKSK se-Sumbar | 50 orang | 82,69 |
| 5 | KSN Expo dan Award dalam HKSAN | Terpublikasikannya kepada masyarakat umum tentang pembangunan kesejahteraan sosial yang telah dilaksanakan dan terjalannya koordinasi dengan mitra kerja pelaksana program pembangunan kesejahteraan sosial | Dapat ikut sertakannya Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat dalam rangka memeriahkan pameran Kesetiakawanan Sosial Nasional (KSN) Expo dan Award | 1 kegiatan | 71,08 |
| 6 | Pelatihan Lanjutan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) se-Sumbar | Meningkatnya kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) se-Sumatera Barat | Terlaksananya Pelatihan Lanjutan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) se-Sumbar | 165 orang | 100,00 |
| 7 | Penguatan Nilai-nilai KSN | Terpenuhinya Penguatan Nilai-Nilai Kesetiakawanan Sosial Nasional (KSN) | Terlaksananya Penguatan Nilai-Nilai Kesetiakawanan Sosial Nasional (KSN) | 1 kegiatan | 100,00 |
| 8 | Bimbingan Jejaring Kerja LKS/ Orsos se-Sumatera Barat dalam rangka Akreditasi | Termotivasinya Pengurus Organisasi Sosial untuk meningkatkan pelayanan kesejahteraan sosial dan kesiapan akreditasi | Terlaksananya Bimbingan Jejaring Kerja LKS / Orsos se Sumatera Barat Dalam Rangka Akreditasi | 50 orang | 88,05 |
| 9 | Penguatan Peran LKS Posdaya dalam Penanggulangan Kemiskinan dan Penyelenggaraan Kesos | Termotivasinya pengurus posdaya dalam penanggulangan kemiskinan | Terlaksananya penguatan peran LKS Posdaya | 640 orang | 98,77 |
| 10 | Penguatan Kelembagaan Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKKS) Provinsi dan Kab/Kota se-Sumatera Barat | Termotivasinya pengurus LKKS Provinsi dan Kab/Kota dalam membina dan mengkoordinasikan kegiatan penyelenggaraan kegiatan sosial | Terlaksananya kegiatan penguatan kelembagaan LKKS provinsi dan kab/kota Sumatera Barat | 180 orang | 100,00 |
| 11 | Penyuluhan Kesejahteraan Sosial | Terinformasikannya program pembangunan | Terlaksananya penyuluhan sosial melalui berbagai media | 3.260 orang | 97,62 |

| | | | | | |
|-----------|---|---|--|---------------|--------------|
| | | kesejahteraan sosial kepada masyarakat | | | |
| 12 | Forum Komunikasi Pengurus Karang Taruna se-Sumbar | Termotivasinya Pengurus Karang Taruna untuk meningkatkan pelayanan kesejahteraan sosial kepada masyarakat | Terlaksananya Pertemuan Forum Komunikasi Pengurus Karang Taruna se-Sumbar | 50 orang | 100,00 |
| 13 | Pelatihan Dasar Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) se-Sumbar | Meningkatnya kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) se-Sumatera Barat | Terlaksananya Pelatihan Dasar Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) se-Sumbar | 685 orang | 100,00 |
| 14 | Penguatan Peran Pilar dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial | Termotivasinya Pilar Kesejahteraan Sosial dalam penanggulangan kemiskinan | Terlaksananya Penguatan Peran Pilar dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial | 180 orang | 100,00 |
| 15 | Bimbingan Pengurus Organisasi se-Sumatera Barat | Termotivasinya pengurus organisasi sosial untuk meningkatkan pelayanan kesejahteraan sosial kepada masyarakat | Terlaksananya bimbingan bagi pengurus organisasi sosial se Sumatera Barat | 50 orang | 84,91 |
| 12 | Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya | | | | 99,98 |
| 1 | Penetapan calon lokasi Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) | Adanya rekomendasi calon lokasi Pemberdayaan KAT | Terlaksananya penetapan calon lokasi Pemberdayaan KAT | 1 rekomendasi | 100,00 |
| 2 | Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) | Diperolehnya indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Dinas Sosial dan UPTD | Terlaksananya Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) | 1 rekomendasi | 100,00 |
| 3 | Pengkajian Gelar Calon Pahlawan Nasional | Diusulkannya calon pahlawan dari Sumbar | Terlaksananya Pengkajian Gelar Calon Pahlawan Nasional | 3 orang | 100,00 |
| 4 | Pelayanan Orang Terlantar | Terpenuhinya pelayanan terhadap orang terlantar di Sumbar | Terlaksananya Pelayanan Orang Terlantar | 38 orang | 99,31 |

| | | | | | |
|-----------|---|---|--|--------------|---------------|
| 5 | Sumbar Expo (Publikasi) | Terpublikasikannya kepada masyarakat umum tentang pembangunan kesejahteraan sosial yang telah dilaksanakan dan terjalannya koordinasi dengan mitra kerja pelaksana program pembangunan kesejahteraan sosial | Terlaksananya Sumbar Expo (Publikasi) | 1 kegiatan | 100,00 |
| 6 | Bimbingan Pemantapan Pengurus LK 3 | Meningkatnya pengetahuan dan profesionalisme pengurus LK3 dalam melaksanakan tugas dan fungsinya | Terlaksananya bimbingan pemantapan bagi pengurus LK3 di 19 Kab/Kota | 50 orang | 100,00 |
| 7 | Bimbingan dan Pelatihan Keterampilan Berusaha bagi Komunitas Adat Terpencil (KAT) | Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan warga Komunitas Adat terpencil dalam pengembangan usahanya | Terlaksananya bimbingan dan pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga Komunitas Adat Terpencil | 30 KK | 100,00 |
| 8 | Bimbingan Teknis Pemantapan Petugas Pendata PMKS | Meningkatnya kemampuan Petugas Pendata PMKS dalam mengumpulkan data PMKS | Terlaksananya Bimbingan Teknis Pemantapan Petugas Pendata PMKS | 96 orang | 95,91 |
| 9 | Sosialisasi Undian Berhadian Gratis (UGB) | Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang Undian Berhadian Gratis (UGB) | Terlaksananya Sosialisasi Undian Berhadian Gratis (UGB) | 25 orang | 100,00 |
| 10 | Bimbingan Keterampilan Berusaha bagi Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) | Meningkatnya kesejahteraan keluarga rentan dan wanita usaha bersama rawan sosial ekonomi (WRSE) | Terlaksananya Bimbingan Keterampilan Berusaha bagi Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) | 15,890 orang | 99,99 |
| 11 | Pembuatan Buku Data PMKS dan PSKS | Terpenuhinya penyediaan data PMKS untuk penyusunan program | Terlaksananya Pembuatan Buku Data PMKS dan PSKS | 1 kegiatan | 100,00 |
| 13 | Program Penanganan Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial | | | | 100,00 |
| 1 | Bantuan Logistik Bencana | Terpenuhinya persediaan logistik bencana | Terlaksananya Bantuan Logistik Bencana | 1 kegiatan | 100,00 |
| 2 | Rakor Bencana Sosial | Terbangunnya koordinasi yang kuat dalam penanganan bencana sosial | Terlaksananya Rakor Bencana Sosial | 59 orang | 100,00 |

| | | | | | |
|-----------|---|--|---|--------------------------------|--------------|
| 3 | Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Logistik Bencana Sosial | Meningkatnya kemampuan petugas dalam Penyusunan Laporan Logistik Bencana Sosial | Terlaksananya Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Logistik Bencana Sosial | 45 orang | 100,00 |
| 4 | Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Logistik Bencana Alam | Meningkatnya kemampuan petugas dalam Penyusunan Laporan Logistik Bencana Alam | Terlaksananya Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Logistik Bencana Alam | 60 orang | 100,00 |
| 5 | Rakor Koordinasi Program Keluarga Harapan | Terbangunnya koordinasi yang kuat dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan | Terlaksananya Rakor Koordinasi Program Keluarga Harapan | 35 orang | 100,00 |
| 6 | Pemantapan Tim TRC Bencana Alam | Meningkatnya kemampuan Tim TRC dalam penanganan bencana alam | Terlaksananya Pemantapan Tim TRC Bencana Alam | 50 orang | 100,00 |
| 7 | Pemantapan Tim Psikososial Bencana Alam | Meningkatnya kemampuan Tim Psikososial dalam penanganan bencana alam | Terlaksananya Pemantapan Tim Psikososial Bencana Alam | 50 orang | 100,00 |
| 8 | Sinergitas Program Keluarga Harapan (PKH) | Terbangunnya sinergi yang efektif dalam penanganan bencana sosial | Terlaksananya Sinergitas Program Keluarga Harapan (PKH) | 76 orang | 100,00 |
| 9 | Peningkatan Capacity Building Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) | Meningkatnya kapasitas Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dalam memberikan pelayanan | Terlaksananya Peningkatan Capacity Building Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) | 76 orang | 100,00 |
| 14 | Program Pemberdayaan Fakir Miskin | | | | 99,95 |
| 1 | Bimbingan Teknis Petugas Verifikasi dan Validasi BDT | Keningkatnya kapasitas dan kinerja Petugas Verifikasi dan Validasi dalam melaksanakan pendataan BDT | Terlaksananya Bimbingan Teknis Petugas Verifikasi dan Validasi BDT | 57 orang | 90,04 |
| 2 | Pengadaan Beras untuk Panti Swasta | Terpenuhinya pemberian kebutuhan pangan beras bagi kelayan dalam panti sosial swasta se Sumatera Barat | Terlaksananya Pengadaan Beras untuk Panti Swasta | 121 panti swasta (4.000 orang) | 100,00 |
| 3 | Bimbingan Pemantapan Pendamping Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) | Keningkatnya kapasitas dan kinerja pendamping BPNT dalam memberikan pendampingan | Terlaksananya Bimbingan Pemantapan Pendamping Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) | 60 orang | 94,43 |

| | | | | | |
|-----------|---|--|---|-------------------------------------|---------------|
| 4 | Seleksi dan Penghargaan KUBE dan Pendamping KUBE Berprestasi | Keningkatnya Motivasi KUBE dan pendamping KUBE untuk meningkatkan kesejahteraan kelompok | Terlaksananya Seleksi dan Penghargaan KUBE dan Pendamping KUBE Berprestasi | 38 orang | 100,00 |
| 5 | Bantuan Pengembangan E-Warung KUBE Jasa Perkotaan dan UMKM | Meningkatnya kesejahteraan kelompok melalui Kelompok Usaha Bersama | Terlaksananya Bantuan Pengembangan E-Warung KUBE Jasa Perkotaan dan UMKM | 167 kelompok | 99,94 |
| 6 | Penumbuhan/Pengembangan Usaha melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Pesisir dan Kepulauan | Meningkatnya kesejahteraan Fakir Miskin Pesisir dan Kepulauan melalui Kelompok Usaha Bersama | Terlaksananya Penumbuhan/Pengembangan Usaha melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Pesisir dan Kepulauan | 8 kelompok | 100,00 |
| 7 | Rapat Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Non Tunai dan RASTRA tahun 2019 | Terantau dan terevaluasinya pelaksanaan program dan kegiatan BPNT/Rastra | Terlaksananya Rapat Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Non Tunai dan RASTRA | 50 orang | 100,00 |
| 8 | Bantuan Penumbuhan Usaha Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) FM Pedesaan | Meningkatnya kesejahteraan Fakir Miskin Pedesaan melalui Kelompok Usaha Bersama | Terlaksananya Bantuan Penumbuhan Usaha Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) FM Pedesaan | 73 kelompok (730 kk) | 100,00 |
| 9 | Bimbingan Pemantapan Pendamping KUBE PFM Pedesaan | Keningkatnya kapasitas dan kinerja pendamping KUBE dalam memberikan pendampingan | Terlaksananya Bimbingan Pemantapan Pendamping KUBE PFM Pedesaan | 50 orang | 100,00 |
| 10 | Rapat Evaluasi Pelaksanaan Verifikasi BDT Kab/Kota | Terpantaunya pelaksanaan verifikasi dan validasi data BDT Kab/ Kota | Terlaksananya Rapat Evaluasi Pelaksanaan Verifikasi BDT Kab/Kota | 57 orang | 100,00 |
| 15 | Program Pencegahan, Penanganan dan Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkoba | | | | 100,00 |
| 1 | Bimbingan dan Pelatihan Keterampilan dan Bimbingan Sosial Korban NAPZA/HIV | Meningkatnya kepercayaan diri korban HIV | Terlaksananya Bimbingan dan Pelatihan Keterampilan dan Bimbingan Sosial Korban NAPZA/HIV | 20 orang | 100,00 |
| 2 | Penyuluhan Penanggulangan Narkoba dan Bimtek Penangan HIV bagi PSKS | Meningkatnya pengetahuan PSKS/ Masyarakat tentang penanggulangan narkoba dan PMS | Terlaksananya Penyuluhan Penanggulangan Narkoba dan Bimtek Penangan HIV bagi PSKS | 150 penyuluh narkoba; 57 bimtek HIV | 100,00 |
| 3 | Rapat Koordinasi Penguatan Lembaga RBM tentang Korban Penyalahgunaan Napza | Meningkatnya pengetahuan peserta tentang penanganan penyalahgunaan | Terlaksananya Rapat Koordinasi Penguatan Lembaga RBM tentang Korban Penyalahgunaan | 55 orang | 100,00 |

| | | | | | |
|--|--------------------------------|-------|-------|--|--------------|
| | | NAPZA | Napza | | |
| | JUMLAH BELANJA LANGSUNG | | | | 99,69 |
| | | | | | |

C. Capaian Indikator Kinerja Daerah

MISI 4 : MEWUJUDKAN EKONOMI PRODUKTIF DAN MAMPU BERSAING DI DUNIA GLOBAL

| TUJUAN | SASARAN POKOK | INDIKATOR | SATUAN | CAPAIAN | | | | PROYEKSI | | ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN |
|--|--|-------------|--------|---------|-------|-------|-------|-------------|--------------|--|
| | | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2021-2025 | | |
| | | | | | | | | TARGET AWAL | TARGET AKHIR | |
| 5. Menurunkan Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran serta Penanganan Daerah Tertinggal | Menurunnya Tingkat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial | Jumlah PMKS | Orang | 5.334 | 4.905 | 4.905 | 4.905 | 4.905 | 4.905 | Menurunnya Penduduk Miskin, Pengangguran dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial |
| | | | | | | | | | | |

MISI 5 : MEWUJUDKAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP YANG BAIK DENGAN PENGELOLAAN SDA BERKELANJUTAN

| TUJUAN | SASARAN POKOK | INDIKATOR | SATUAN | CAPAIAN | | | | PROYEKSI | | ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN |
|---|---|--|--------|---------|-------|--------|--------|-------------|--------------|--|
| | | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2021-2025 | | |
| | | | | | | | | TARGET AWAL | TARGET AKHIR | |
| 3. Meningkatkan Budaya dan Perilaku Masyarakat Yang Tanggap Bencana | Meningkatnya Penanganan Tangap Darurat dan Pemulihan Wilayah/Daerah Pasca Bencana | Persentase Kejadian Bencana Yang Bisa Di Tangani sesuai Standar Kapasitas Penanggulangan Bencana | % | 17,60% | 1,64% | 25,27% | 12,71% | 17,18% | 17,18% | Meningkatnya Mitigasi Bencana dan Penanganan Bencana |
| | | | | | | | | | | |

D. Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

Penyelenggaraan urusan wajib yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat secara keseluruhan terlaksana dengan baik sesuai dengan yang telah direncanakan serta fisik kegiatan dapat terealisasi sesuai target. Namun, dari 14 program dan 119 kegiatan, terdapat 3 (tiga) kegiatan dengan realisasi fisik tidak mencapai 100% yakni sebagai berikut:

1. Kegiatan Penyuluhan Kesejahteraan Sosial

Pada kegiatan ini honor tidak dibayarkan untuk relawan penyuluh sosial dikarenakan pertimbangan bahwa relawan belum melakukan kegiatan penyuluhan di lapangan. Efisiensi dana pakaian kerja lapangan.

2. Kegiatan Penguatan Peran LKS Posdaya dalam Penanggulangan Kemiskinan: Dalam pagu murni penggantian transport peserta indeksnya tidak sesuai dengan Pergub, telah diajukan pada anggaran perubahan namun tidak terakomodir, maka hanya dapat dilakukan untuk 5 lokasi saja.
3. Kegiatan Penguatan Kelembagaan LKKS: Terjadi silpa perjadiin Konferensi Nasional Kesejahteraan Sosial, yang ditunda pelaksanaannya pada tahun 2020 karena pemerintah Gorontalo tidak menyediakan anggaran pendukung.

b) Solusi

Solusi yang dilakukan adalah melakukan koordinasi dengan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat dan kegiatan ini kembali diusulkan Tahun Anggaran 2020 dengan data yang telah diverifikasi dan divalidasi oleh Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat.

E. Penghargaan Nasional yang Diterima

Penghargaan nasional yang diterima pada tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Penghargaan dari Menteri Sosial RI sebagai Terbaik II Capaian Program Penangan Fakir Miskin tahun 2019 Tingkat Nasional;
2. Penghargaan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) Teladan Nasional Peringkat III.

F. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Tahun 2018

| No | Rekomendasi | SKPD Terkait | Tenggang Waktu | Tindak Lanjut |
|----|--|--------------|---------------------|--|
| 1 | Urusan Sosial | | | |
| | Rekomendasi terhadap pelaksanaan Urusan Sosial sebagai berikut : | | | |
| | 1. Pelaksanaan kegiatan KUBE sebaiknya dilaksanakan secara terpadu dengan OPD terkait, sehingga dapat lebih tepat sasaran dan mampu memberikan manfaat yang lebih besar terhadap anggota | DINAS SOSIAL | Tahun Anggaran 2020 | Seluruh bantuan KUBE yang diserahkan kepada masyarakat telah sesuai dengan permintaan masing-masing anggota KUBE dengan berpedoman kepada RUKU |

| | | | | | |
|--|----|--|--------------|---------------------|---|
| | | KUBE tersebut, terutama untuk meningkatkan pendapatannya. | | | (Rencana Usulan Kebutuhan Usaha); |
| | 2. | Dinas Sosial dengan melibatkan OPD terkait, perlu memberikan pendampingan terhadap kegiatan Anggota KUBE, agar pelaksanaan kegiatan lebih optimal. | DINAS SOSIAL | Tahun Anggaran 2020 | Bantuan Usaha Ekonomi Produktif KUBE telah diselenggarakan dari tahun 2007 dan dalam pelaksanaan kegiatan KUBE Dinas Sosial telah merekrut sumber daya manusia yang profesional dan telah mendapatkan pendidikan dan pelatihan/bimbingan teknis oleh Kementerian Sosial RI, SDM tersebut ditunjuk sebagai tenaga pendamping dalam optimalisasi pemanfaatan bantuan UEP KUBE; |
| | 3. | Data-data Kemiskinan perlu di Update secara terus menerus sehingga dapat menjadi valid dan akuntabel. Tanpa dukungan data-data yang valid dan akuntabel, maka sulit untuk merumuskan kebijakan yang tepat dan hasil pelaksanaan kegiatan pun tidak akan sesuai dengan sasaran yang diinginkan. | DINAS SOSIAL | Tahun Anggaran 2020 | Data kemiskinan telah diakomodir oleh Basis Data Terpadu yang dikelola oleh Pusat Data dan Informasi Kementerian Sosial RI. Updating data kemiskinan dilakukan dengan melaksanakan verifikasi dan validasi data kemiskinan 2 kali dalam satu tahun (bulan April dan November), yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten dan Kota sesuai dengan Permensos No.13 tahun 2011 tentang "PEDOMAN UMUM VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA TERPADU PENANGANAN FAKIR MISKIN DAN ORANG TIDAK MAMPU"; |
| | 4 | Untuk penyelesaian permasalahan sosial yang masih banyak terjadi di tengah-tengah masyarakat, Pemerintah Daerah tidak bisa menjadikan alasan urusan kewenangan untuk tidak menyelesaikan permasalahan tersebut. Penyelesaian permasalahan sosial tersebut tidak bisa diselesaikan oleh satu sektor saja, oleh sebab itu Pemerintah Daerah perlu lebih meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi program dan kegiatan dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Pusat dalam mengatasi permasalahan sosial tersebut. | DINAS SOSIAL | Tahun Anggaran 2020 | Penyelenggaraan Pembangunan Kesejahteraan Sosial dilaksanakan berdasarkan UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang membagi kewenangan antara Pusat, Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Pembangunan Kesejahteraan Sosial yang dilaksanakan telah memenuhi indikator-indikator permasalahan sosial yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat yang menjadi tanggung jawab bersama. |

| | | | | | | |
|---|---|--|--------------|---------------------|---|---|
| | 5 | Pemerintah Daerah bersama-sama dengan 3 (tiga) Pemerintah Daerah Kabupaten terkait serta Pemerintah Pusat, perlu merumuskan kebijakan dan langkah-langkah konkrit untuk mengeluarkan 3 (tiga) Daerah Kabupaten tersebut dari kelompok Daerah Tertinggal. Harus ada dukungan program/kegiatan dan anggaran dari APBD Provinsi Sumatera Barat untuk 3 (tiga) Daerah tersebut. | DINAS SOAIAL | Tahun Anggaran 2020 | | Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat telah mengakomodir program/kegiatan dan anggaran terkait percepatan pembangunan daerah tertinggal melalui program Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT), dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya baik melalui dana APBD maupun APBN, namun untuk Kab.Pasaman Barat dan Kab. Solok Selatan tidak termasuk dalam kategori Komunitas Adat Terpencil (KAT) sesuai Perpres No.9 tahun 2011 dan tidak masuk dalam database Kemensos RI. |
| Rekomendasi Fraksi Partai Gerindra | | | | | | |
| | 1 | Pembenahan di Dinas Sosial dilakukan guna mengurangi kemiskinan guna menghilangkan status Daerah Tertinggal yang masih terdata di Provinsi Sumbar. Pemerintah Daerah bersama Pemerintah Kabupaten yang masih tertinggal itu, harus punya target, kapan status Daerah Tertinggal itu bisa dihilangkan. Khusus data kemiskinan yang berpedoman kepada Basis Data Terpadu (BDT), harus ada upaya secara terus menerus terhadap UpDate (pembaharuan) data BDT tersebut, sehingga data tersebut menjadi valid dan akuntabel, dan ketika dilakukan pemberian bantuan, menjadi tepat sasaran bagi penerima manfaat. | DINAS SOSIAL | Tahun Anggaran 2021 | 1 | Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat telah mengakomodir program/kegiatan dan anggaran terkait percepatan pembangunan daerah tertinggal melalui program Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT), dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya baik melalui dana APBD maupun APBN, namun untuk Kab.Pasaman Barat dan Kab. Solok Selatan tidak termasuk dalam kategori Komunitas Adat Terpencil (KAT) sesuai Perpres No.9 tahun 2011 dan tidak masuk dalam database Kemensos RI. Untuk itu perlu koordinasi komprehensif dengan Kementerian Sosial RI. |
| | | | DINAS SOSIAL | Tahun Anggaran 2020 | 2 | Data kemiskinan telah diakomodir oleh Basis Data Terpadu yang dikelola oleh Pusat Data dan Informasi Kementerian Sosial RI. Updating data kemiskinan dilakukan dengan melaksanakan verifikasi dan validasi data kemiskinan 2 kali dalam satu tahun (bulan April dan November), yang |

| | | | | | |
|---|---|--------------|---------------------|--|---|
| | | | | | <p>dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten dan Kota sesuai dengan Permensos No.13 tahun 2011 tentang "PEDOMAN UMUM VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA TERPADU PENANGANAN FAKIR MISKIN DAN ORANG TIDAK MAMPU" . Kemudian koordinasi terkait verifikasi dan validasi akan terus dilakukan dengan Dinas Sosial Kabupaten/Kota karena yang melakukan verifikasi dan validasi diserahkan ke Kabupaten/Kota.</p> |
| Rekomendasi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera | | | | | |
| 1 | <p>Agar kegiatan-kegiatan pada Dinas Sosial terutama yang bersentuhan langsung dengan masyarakat seperti KUBE agar lebih dikelola secara profesional.</p> | DINAS SOSIAL | Tahun Anggaran 2020 | <p>Kegiatan-kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat terutama pemberian bantuan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar masyarakat khususnya PMKS akan lebih ditingkatkan serta dikelola dengan maksimal mulai dari tahapan perencanaan dan penganggaran, pemetaan sumber daya dan tahapan kegiatan, pelaksanaan kegiatan yang profesional, dan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja program dan kegiatan tersebut.</p> | |

BAB II

PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN DEKONSENTRASI

A. Tugas Pembantuan yang diterima

1. Dasar Hukum

Dasar Hukum dari pelaksanaan Tugas Pembantuan adalah sebagai berikut :

- a) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan; dan
- b) DIPA Kementerian Sosial RI Nomor : SP DIPA- 027.03.4.089141/2019

2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan

Tugas Pembantuan yang diterima oleh Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat berasal dari Kementerian Sosial Republik Indonesia.

3. Satuan Kerja Perangkat daerah yang Melaksanakan

Tugas Pembantuan (TP) Kementerian Sosial RI tahun 2019 dilaksanakan oleh Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat.

4. Program dan Kegiatan yang diterima dan pelaksanaannya.

Program dan Kegiatan Tugas Pembantuan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat sebagai berikut :

- a) Program Pemberdayaan Sosial dengan kegiatan :

Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (PKAT)

Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil yang dilaksanakan di Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan memberikan Bantuan Stimulan Pemukiman Sosial bagi 100 KK warga KAT di Dusun Matektek, memberikan Bantuan Jaminan Hidup Tahun I untuk 100 KK di Dusun Matektek, memberikan Bantuan Peralatan (kerja & rumah tangga) dan bibit tanaman keras dan sertifikasi lahan bagi 100 KK warga KAT di Dusun Matektek, serta menyediakan infrastruktur berupa Balai Sosial bagi warga KAT di Dusun Matektek, dan memberikan Bantuan Jaminan Hidup Tahun II untuk 93 KK di Dusun Sirua Monga.

5. Jumlah Anggaran

Jumlah anggaran Tugas Pembantuan tahun 2019 sebesar : **Rp. 3.834.690.000,-**

6. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan

Realisasi Program Pemberdayaan Sosial sebagai berikut :

- a) Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (PKAT) di Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan Sub Kegiatan yang dilaksanakan:
- 1) Pembangunan Rumah Sederhana bagi Warga KAT sebanyak 100 Unit di Dusun Matektek;
 - 2) Bantuan Pembangunan 1 unit Balai Sosial di Dusun Matektek;
 - 3) Bantuan Jaminan Hidup Tahun I bagi Warga KAT untuk 100 KK di Dusun Matektek;
 - 4) Bantuan Bibit Tanaman bagi Warga 100 Paket di Dusun Matektek;
 - 5) Bantuan Peralatan Kerja bagi Warga, 10 Paket di Dusun Matektek;
 - 6) Bantuan Peralatan Rumah Tangga untuk 100 Paket di Dusun Matektek;
 - 7) Bantuan Jaminan Hidup Tahun II bagi Warga KAT untuk 93 KK di Dusun Sirua Monga.

Realisasi Fisik Kegiatan = Rp. 3.834.490.000,- (100%) dan Realisasi Keuangan sebesar = Rp. 3.497.664.000,- (91,21%).

7. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan

Kegiatan Tugas Pembantuan yang sifatnya Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat hanya sebagai pelaksana, petunjuk kegiatan dan kerangka acuan di buat oleh Kementerian Sosial.

Untuk pelaksanaan kegiatan Tugas Pembantuan tahun 2019 secara prinsip tidak terdapat permasalahan, semua kegiatan dapat berjalan sesuai waktunya dan rencana yang telah ditetapkan.

B. PENYELENGGARAAN TUGAS DEKONSETRASI

a. Dasar Hukum

Dasar Hukum dari pelaksanaan Tugas Dekonsentrasi adalah sebagai berikut :

- c) Undang-Undang No. 15 Tahun 2017 tentang APBN TA 2018
- d) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan; dan
- e) DIPA Kementerian Sosial RI Nomor :
 - 1) SP DIPA- 027.01.3.080038/2019
 - 2) SP DIPA- 027.03.3.089029/2019
 - 3) SP DIPA- 027.04.3.089030/2019
 - 4) SP DIPA- 027.05.3.089031/2019
 - 5) SP DIPA- 027.06.3.418958/2019

b. Instansi Pemberi Tugas Dekonsentrasi

Dana dekonsentrasi yang diterima berasal dari Kementerian Sosial Republik Indonesia.

c. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Melaksanakan

Dana dekonsentrasi dari Kementerian Sosial Republik Indonesia ini dilaksanakan oleh Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Sosial, dengan kegiatan Perencanaan dan Penganggaran dilaksanakan oleh Sekretariat;
- 2) Program Pemberdayaan Sosial dilaksanakan oleh Bidang Pemberdayaan Sosial;
- 3) Program Rehabilitasi Sosial dilaksanakan oleh Bidang Rehabilitasi Sosial;
- 4) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial dilaksanakan oleh Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial; dan
- 5) Program Penanganan Fakir Miskin dilaksanakan oleh Bidang Penanganan Fakir Miskin.

d. Sumber dan Jumlah Anggaran

Pada Tahun 2019, Dinas Sosial memperoleh anggaran APBN yang bersumber dari dana dekonsentrasi Kementerian Sosial dengan total anggaran sebesar Rp16.239.098.000,00 dan realisasi sebesar Rp15.988.304.300,00 (98,46%).

e. Program dan Kegiatan yang Diterima dan Pelaksanaannya

Adapun program dan kegiatan yang diterima dan pelaksanaannya adalah:

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Sosial, dengan alokasi dana sebesar Rp258.419.000,00 realisasi sebesar Rp245.308.200,00 (94,93%). Output kegiatan adalah Layanan Perencanaan;
2. Program Pemberdayaan Sosial, dengan anggaran sebesar Rp2.922.500.000,00 realisasi sebesar Rp2.904.893.500,00 (99,40%). Output kegiatan adalah :
 - a) Orang atau pihak yang mendapatkan penghargaan dan penanaman nilai kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan, dan restorasi sosial, serta TMPN/TMP/MPN yang direhab dan dipelihara sebanyak 4 unit;
 - b) PSKS Perorangan yang mendapatkan pemberdayaan, PSKS Lembaga yang mendapatkan pemberdayaan, Layanan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan sosial perorangan, keluarga, dan kelembagaan masyarakat, dan Layanan penyelenggaraan kesejahteraan sosial keluarga yang melakukan penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
 - c) Layanan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan komunitas adat terpencil (PKAT);
 - d) Layanan pengelolaan sumber dana bantuan sosial (PSDBS).
3. Program Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, dan Pengembangan dan Penyuluhan Sosial dengan anggaran Rp284.040.000,00 dan

realisasi sebesar Rp268.800.000,00 (94,63%). Output kegiatan ini adalah:

a) Komunitas yang mendapatkan layanan penyuluhan sosial.

4. Program Rehabilitasi Sosial dengan anggaran sebesar Rp2.436.923.000,00 dan realisasi sebesar Rp2.245.138.500,00 (92,13%). Output dari kegiatan ini adalah:

a) Korban penyalahgunaan NAPZA yang mendapatkan rehabilitasi dan perlindungan sosial;

b) Penyandang disabilitas fisik, mental, sensorik, dan intelektual yang mendapatkan rehabilitasi dan perlindungan sosial;

c) Tuna sosial dan korban perdagangan orang yang mendapatkan rehabilitasi dan perlindungan sosial;

d) Anak balita terlantar, anak terlantar/ anak jalanan, anak berhadapan dengan hukum, dan anak yang membutuhkan perlindungan khusus yang mendapatkan rehabilitasi dan perlindungan sosial; Kabupaten/ Kota yang mengembangkan pusat kesejahteraan sosial anak integratif (PKSAI), dan

e) Lanjut usia yang mendapatkan rehabilitasi dan perlindungan sosial dan Lanjut usia yang mendapatkan pelayanan Home Care.

5. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial dengan anggaran sebesar Rp6.518.020.000,00 dan realisasi sebesar Rp6.509.448.600,00 (99,87%). Output dari kegiatan ini adalah:

a) Kesiapsiagaan dan mitigasi masyarakat di lokasi rawan bencana;

b) Korban bencana sosial yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar;

c) Keluarga miskin yang mendapat bantuan tunai bersyarat.

6. Program Penanganan Fakir Miskin dengan anggaran sebesar Rp3.819.196.000,00 dan realisasi sebesar Rp3.814.715.500,00 (99,88%). Output dari kegiatan ini adalah:

a) KPM yang memperoleh bantuan usaha ekonomi produktif;

f. Permasalahan dan Solusi

Kegiatan Tugas Deskonsentrasi yang sifatnya Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat hanya sebagai pelaksana, petunjuk kegiatan dan kerangka acuan di buat oleh Kementerian Sosial.

Untuk pelaksanaan kegiatan Tugas Dekonsentrasi tahun 2019 secara prinsip tidak terdapat permasalahan, semua kegiatan dapat berjalan sesuai waktunya dan rencana yang telah ditetapkan.

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Kesejahteraan sosial merupakan suatu keadaan terpenuhinya kebutuhan hidup yang layak bagi masyarakat sehingga mampu mengembangkan diri dan dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. Program kesejahteraan sosial dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial (UU No 11 Tahun 2009 pasal 1 dan 2).

Pembangunan Kesejahteraan Sosial merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pembangunan Nasional. Pembangunan Kesejahteraan Sosial berperan aktif dalam meningkatkan kualitas hidup bangsa Indonesia. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial merupakan urusan wajib yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, dalam hal ini diemban oleh Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat karena urusan sosial merupakan urusan yang menyangkut kepada pelayanan dasar terhadap masyarakat, khususnya bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

Begitu juga dengan telah diterbitkannya regulasi tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM), yakni Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Program pembangunan kesejahteraan sosial yang dirancang dalam Renstra Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021, pada tahun 2019 ini telah berjalan untuk tahun ke-4. Hasil yang dicapai dari program kegiatan pembangunan kesejahteraan sosial telah dapat meningkatkan taraf kesejahteraan sosial kelompok masyarakat sasaran yang sangat rentan.

B. SARAN

- 1) Koordinasi dengan Kab/Kota terkait *updating* data PMKS sebagai dasar penyusunan program/kegiatan baik dari dana dekonsentrasi maupun dana desentralisasi, hal ini diharapkan untuk meminimalisir kesalahan dalam penentuan sasaran.
- 2) Perlunya optimalisasi program dan kegiatan yang berhubungan dengan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Padang, Januari 2020

Kepala Dinas

JUMAIDI, S.Pd, M.Pd.
NIP. 19670817 200003 1 006